

**STRATEGI KOMUNIKASI PARTAI POLITIK DALAM PEMENANGAN
GUBERNUR LAMPUNG DI PILKADA SERENTAK 2024
(STUDI PADA PARTAI GERINDRA)**

Skripsi

Oleh:

**MUHAMMAD ANDHIKA
NPM 2156021013**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**STRATEGI KOMUNIKASI PARTAI POLITIK DALAM PEMENANGAN
GUBERNUR LAMPUNG DI PILKADA SERENTAK 2024
(STUDI PADA PARTAI GERINDRA)**

Oleh:

MUHAMMAD ANDHIKA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

STRATEGI KOMUNIKASI PARTAI POLITIK DALAM PEMENANGAN GUBERNUR LAMPUNG DI PILKADA SERENTAK 2024 (STUDI PADA PARTAI GERINDRA)

**Oleh
MUHAMMAD ANDHIKA**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keberhasilan pasangan tersebut meraih kemenangan telak dengan perolehan suara 82,54%, mengungguli pesaingnya yang hanya memperoleh 17,46%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi komunikasi yang diterapkan Partai Gerindra dalam kemenangan Gubernur Lampung, guna memahami bagaimana strategi tersebut berperan dalam membentuk opini publik dan memperoleh dukungan luas.

Penelitian ini menggunakan teori strategi komunikasi dari Kotten, yang membagi strategi menjadi empat dimensi: strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan strategi kelembagaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan dokumentasi, yang melibatkan informan dari berbagai kalangan seperti kader partai, tim pemenang, tokoh adat, akademisi, hingga masyarakat pemilih.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi Partai Gerindra dijalankan secara sistematis dan intensif melalui strategi organisasi seperti konsolidasi kader, strategi program seperti pelibatan influencer, penggunaan media sosial, strategi pendukung sumber daya seperti pengelolaan kader partai, dana kampanye, dan strategi kelembagaan dengan pendekatan langsung kepada masyarakat. Setiap elemen strategi memainkan peran penting dalam membentuk citra pasangan calon dan meningkatkan elektabilitas secara signifikan dalam waktu relatif singkat. Namun Strategi Program memiliki pengaruh yang penting dalam meningkatkan elektabilitas pasangan Mirza-Jihan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keberhasilan pasangan Mirza-Jihan dalam PILKADA Lampung tidak terlepas dari strategi komunikasi politik yang terencana, terarah, dan berbasis pada pemahaman sosial-politik lokal. Strategi tersebut menjadi contoh keberhasilan komunikasi politik dalam kontestasi elektoral di tingkat daerah.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Partai Politik, PILKADA, Partai Gerindra, Komunikasi Politik, Pemilu Lokal, Kampanye Politik.

ABSTRACT

POLITICAL PARTY COMMUNICATION STRATEGY IN THE VICTORY OF THE LAMPUNG GOVERNOR IN THE 2024 SIMULTANEOUS REGIONAL ELECTION (A Study on the Gerindra Party)"

**By
Muhammad Andhika**

This research is motivated by the landslide victory of the candidate pair, who secured 82.54% of the votes, significantly outperforming their competitor, who only gained 17.46%. The purpose of this study is to analyze the communication strategy implemented by the Gerindra Party in the nomination of the Governor of Lampung, in order to understand how the strategy contributed to shaping public opinion and gaining broad support. The study applies Kottan's theory of communication strategy, which categorizes strategy into four dimensions: organizational strategy, program strategy, resource support strategy, and institutional strategy. The research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques including in-depth interviews and documentation. Informants came from various backgrounds, including party cadres, campaign team members, traditional leaders, academics, and voters. The findings show that Gerindra Party's communication strategy was carried out systematically and intensively through organizational strategies such as cadre consolidation; program strategies involving influencers and the use of social media; resource support strategies including management of party cadres and campaign funding; and institutional strategies through direct engagement with the community. Each strategic element played a crucial role in shaping the image of the candidate pair and significantly boosting their electability in a relatively short period. However, the program strategy was found to have the most substantial impact on increasing the electability of the Mirza–Jihan pair. The conclusion of this study is that the success of the Mirza–Jihan pair in the Lampung regional election cannot be separated from a political communication strategy that was well-planned, targeted, and grounded in a deep understanding of the local socio-political context. This strategy serves as a model for successful political communication in local electoral contests.

Keywords: *Communication Strategy, Political Party, Local Election, Gerindra Party, Political Campaign, Local Governance.*

Judul Skripsi : **STRATEGI KOMUNIKASI PARTAI POLITIK
DALAM PEMENANGAN GUBERNUR
LAMPUNG DI PILKADA SERENTAK 2024
(STUDI PADA PARTAI GERINDRA)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Andhika**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2156021029**

Program Studi : **S-1**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Prof. Arizka Warganegara, Ph.D
NIP. 198106202006041003

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan



Tabah Maryanah
NIP. 197106042003122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Arizka Warganegara, Ph.D



Penguji Utama : Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si
NIP. 19760821200032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 06 Agustus 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 06 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Andhika

NPM 2156021029

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Muhammad Andhika, dilahirkan di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada hari Senin tanggal 2 Juni 2003. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Subandi dan Ibu Nurhayati. Penulis memiliki 2 adik yaitu ALM. Achmad Reza, dan Mia Andini Putri.

Penulis memiliki jenjang akademis dimulai dari Pendidikan TK Kartini Bandar Lampung pada tahun 2007. Dilanjutkan dengan Pendidikan di SD Negeri 2 Palapa Bandar Lampung serta lulus dari Sekolah Dasar pada tahun 2015. Pada tahun 2018, penulis lulus dari SMP Negeri 25 Bandar Lampung dilanjutkan dengan pendidikan di SMA Negeri 1 Bandar Lampung yang lulus pada tahun 2021. Ditahun 2021 penulis diterima sebagai mahasiswa di jurusan S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan menempuh jalur mandiri.

Penulis bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung sebagai Ketua Biro empat yaitu bidang Kewirausahaan pada periode 2023. Penulis melaksanakan salah satu nilai dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat atau KKN di Desa Tanjung Bulan, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dan mengikuti magang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung pada bulan Februari-Agustus 2024.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim

Dengan segala kerendahan hati serta rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia nya, saya persembahkan karya yang sederhana ini kepada:

Orang Tuaku tercinta Ibu Nurhayati dan Ayah Subandi

Ibu dan Ayah, terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan kepadaku. Terimakasih atas doa, dukungan dan pengorbanan yang selalu kalian berikan. Segala jerih payah ini adalah untuk kalian.

Dosen Pembimbing, Dosen Penguji dan seluruh Bapak/Ibu Dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan

Terimakasih atas segala bimbingan, arahan, kritik dan saran, kesabaran dan ilmu yang telah Bapak/Ibu berikan selama masa studi saya. Semoga segala kebaikan dan dedikasi Bapak/Ibu menjadi amal jariyah yang tak terputus.

Doa Untuk Diri Sendiri

Terimakasih sudah bertahan, berjuang dan tidak menyerah dengan apapun yang menyulitkan dan rintangannya. Terimakasih telah terus melangkah, meski lelah dan ingin berhenti. Semoga dengan pencapaian ini menjadi Langkah awal untuk meraih mimpi-mimpi yang lebih baik dan lebih besar lagi kedepannya.

MOTTO

“Dan seburuk-buruknya seorang hamba Allah, jika dia kembali bersujud tetap
Allah Ampuni dosa-dosanya”
(Qs. An-Nahl:119)

“Jangan Pernah merasa tertinggal, setiap orang punya proses dan rezeki nya
masing-masing”
(Qs. Maryam:4)

“Kebahagiaan adalah bagaimana perasaan anda ketika anda tidak sengsara”
(John Lennon)

“Mimpi yang mendukung sukses itu bukan mimpi yang kita temui saat tidur, tetapi
yang mendukung sukses itu adalah mimpi yang membuat susah tidur”
(Cristiano Ronaldo)

“Jika sudah berani memulai, maka lakukanlah sampai selesai”
(Muhammad Andhika)

SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan petunjuk-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Strategi Komunikasi Politik Partai Gerindra Dalam Pemenangan Gubernur di Pilkada Serentak 2024 (Studi Pada Partai Gerindra)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Saya sangat menyadari bahwa tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, penyusunan ini tidak akan berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu, dikesempatan ini saya ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., Rektor Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas ini.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustiana Zainal, S.Sos., M.Si. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan izin dan dukungan selama proses studi.
3. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si., Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Bapak Bendi Juantara S.IP., M.A., Sekertaris Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah selalu memberikan arahan dan semangat selama masa studi.
4. Bapak Bendi Juantara S.IP., Ma., sebagai Pembimbing Akademik saya, yang selalu memberi arahan selama saya melaksanakan pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
5. Bapak Prof. Arizka Warganegara Ph.D, selaku dosen pembimbing saya selama saya mengerjakan skripsi, yang dengan sabar membimbing saya, memberikan masukan yang baik kepada saya dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Prof. Feni Rosalia., M.Si., selaku dosen penguji saya yang telah memberikan saran dan masukan selama saya melakukan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan atas ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
8. Untuk Ibu saya yang sangat saya sayangi Ibu Nurhayati, atas doa dan dukungan dan kasih sayang yang tiada hentinya.
9. Untuk Ayah saya yang sangat saya banggakan Ayah Subandi, atas cinta dan kasih yang diberikan kepada saya.
10. Untuk keluarga saya tercinta khususnya Umati Ris, atas dukungan dan doanya sampai saat ini.
11. Untuk saudara kandung saya, Mia Andini Putri, atas doa, dukungan dan menjadi salah satu sumber kebahagiaan saya.
12. Untuk sepupu-sepupu saya Ses Eta, Susi Ina, Ajo Fahmi, dan sepupu saya yang masih banyak lagi, yang telah membantu, mendukung dan mendoakan saya sampai saat ini.
13. Untuk sahabat saya Yanda, Faris, Vadil, Aga, Berlian, atas kebersamaan, kebahagiaan, doa, bantuan serta dukungan yang diberikan sampai saat ini.
14. Untuk sahabat saya semasa kuliah Aryo, Bela, Bisma, Biya, Desta, Fania, Ghifari, Ira, Nita, Pairus, Rafli, Raihan, Safira, Sisy, Wahyu, Zahra, atas kebersamaan, tawa, dukungan serta perjuangan selama masa kuliah ini bersama-sama dan selalu saling menguatkan.
15. Untuk sahabat saya Rafli, Pairus, Ghifari, Raihan, Bisma dan Aryo, yang selalu membantu, menjadi sumber kebahagiaan, dan memberikan dukungan tiada henti nya kepada saya.
16. Untuk Rafli yang tidak pernah lelah untuk membantu saya selama saya melakukan penelitian skripsi.
17. Untuk Paisur sahabat saya yang selalu berjuang bersama dalam senang maupun susah di saat kuliah, ataupun tidak saat kuliah.
18. Untuk seseorang yang tidak bisa saya sebutkan namanya, atas kesabaran, doa, dukungan dan kasih sayang sampai saat ini serta menjadi sumber semangat dalam kehidupan ini.

19. Untuk sahabat KKN saya, Anggi, Bela, Kak Mareta, Reisyah, Rafael dan Dani atas kerjasama, kebersamaan, dan dukungan yang telah kita lalui bersama.

Saya menyadari bahwa skripsi yang telah saya selesaikan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya menerima segala kritik saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang mendatang. Harapan saya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan hidayah nya kepada kita semua.

Bandar Lampung, 06 Agustus 2025

Muhammad Andhika

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Strategi Komunikasi Politik	11
2.1.1. Definisi Startegi Komunikasi	11
2.1.2. Fungsi Strategi Komunikasi Politik.....	16
2.2. Tinjauan Pustaka Strategi Kampanye.....	17
2.2.1. Definisi Kampanye.....	17
2.2.2. Tujuan Kampanye Politik.....	19
2.2.3. Strategi Kampanye Politik.....	20
2.3. PILKADA	21
2.3.1. Definisi PILKADA.....	21
2.3.2. Tujuan PILKADA	22
2.3.3. Prosedur PILKADA	23
2.4. Kerangka Pikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1. Jenis Data	26
3.2. Fokus Penelitian	27
3.3. Lokasi Dan Waktu	27
3.4. Sumber Data	28
3.5. Informan Penelitian	28
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	29

3.7.	Teknik Analisis Data	30
3.8.	Teknik Keabsahan Data	31
BAB IV GAMBARAN UMUM.....		34
4.1.	Partai Politik.....	34
4.1.1.	Sejarah Partai Politik	34
4.1.2.	Sejarah Partai Politik Lampung	38
4.1.3.	Fungsi Partai Politik	41
4.2.	Partai Gerindra	41
4.2.1.	Sejarah Partai Gerindra	41
4.2.2.	Partai Gerindra di Lampung	44
4.3.	Pemilihan Kepala Daerah.....	46
4.3.1	Fungsi PILKADA	49
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		50
5.1.	Strategi Organisasi Partai Gerindra	52
5.1.1.	Visi Misi Organisasi Partai Gerindra	53
5.1.2.	Tujuan Strategi Organisasi Partai Gerindra	62
5.1.3.	Hasil Strategi Organisasi Partai Gerindra	71
5.2.	Strategi Program Partai Gerindra.....	73
5.2.1.	Program Partai Gerindra	73
5.2.2.	Manfaat Program Partai Gerindra	79
5.2.3.	Hasil Analisis Strategi Program Partai Gerindra	85
5.3.	Strategi Pendukung Sumber Daya Partai Gerindra	87
5.3.1.	Pemanfaatan Pendukung Sumber Daya	88
5.3.2.	Hasil Analisi Strategi Sumber Daya Partai Gerindra	96
5.4.	Strategi Kelembagaan Partai Gerindra	97
5.4.1.	Fokus Strategi Kelembagaan	97
5.5	Hasil Analisis Strategi Partai Gerindra.....	101
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....		114
6.1.	Kesimpulan	114
6.2.	Saran	115
DAFTAR PUSTAKA		116
PANDUAN WAWANCARA		122
DOKUMENTASI.....		137

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perolehan suara PILKADA Provinsi Lampung 2024.	4
Tabel 2. Nama-nama Influencer	6
Tabel 3. Informan	29
Tabel 4. Struktur TPT Partai Gerindra.....	58
Tabel 5. Kordinasi dan Kerjasama Partai Gerindra.....	66
Tabel 6. Dokumentasi Strategi Organisasi	72
Tabel 7. Program kegiatan Partai Gerindra dan Rachmat Mirzani Djausal	76
Tabel 8. Sosial Media.....	77
Tabel 9. Kegiatan Rachmat Mirzani Djausal	81
Tabel 10. Dokumentasi Kegiatan Kampanye	84
Tabel 11. Dokumentasi Program Gerindra.....	86
Tabel 12. Dokumentasi Sumber Daya Gerindra	91
Tabel 13. Nama Organisasi	99
Tabel 14. Dokumentasi Kelembagaan.....	101

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir.....	25
Gambar 2. Visi dan Misi	51
Gambar 3. Kampanye	75
Gambar 4. Konser Musik	75
Gambar 5. Acara Keagamaan.....	75

DAFTAR SINGKATAN

PILKADA	: Pemilihan Kepala Daerah
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilu
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
TPT	: Tim Pemenangan Terpadu
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
PAC	: Pimpinan Anak Cabang
DAPIL	: Daerah Pemilihan
APK	: Alat Peraga Kampanye
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
PNI	: Partai Nasional Indonesia

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pemilu demokrasi, Newton & Van Deth (2016) mengatakan pemungutan suara memiliki bentuk pemilihan umum dengan bermacam tingkatan yaitu sistem politik dan referendum yang berguna untuk menyampaikan opini publik tentang perkara tertentu, yang seringkali melibatkan perubahan konstitusi atau masalah kebijakan utama terutama yang dipersoalkan secara moral dan emosional (Maharani, 2019). Beberapa negara yang memiliki paham demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai pedoman dari demokrasi itu. Budiharjo (2008) mengatakan, hasil dari pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat (Maharani, 2019).

Perkembangan secara signifikan terjadi dalam pelaksanaan demokrasi di daerah, sesuai dengan tuntutan reformasi. Disahkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari Undang-undang No. 22 Tahun 1999, telah mengubah tata cara pemilihan kepala daerah. Kepala Daerah yang sebelumnya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diubah menjadi dipilih langsung oleh masyarakat. Marbun (2013) mengatakan, dalam Kamus Politik, partisipasi adalah ambil bagian atau turut serta. Kalimat ini lebih populer dalam mengartikan ikutnya seseorang atau badan dalam satu pekerjaan atau rencana besar (Wardhani, 2018).

Pemilihan kepala daerah pun dilakukan secara langsung, yang dimana calon pemimpin kepala daerah ditentukan oleh suara rakyat. Legowo (2005) mengatakan, PILKADA langsung ini diharapkan mendorong partisipasi politik yang lebih terbuka, acara yang *fair*, dan mengharapkan

akuntabilitas lokal yang lebih baik dalam (Manar, 2018). Seperti pada awalnya tujuan awalnya PILKADA langsung adalah upaya untuk menciptakan pemerintahan lokal yang demokratis, namun tidak ada konsep regulasi yang menegaskan dan menjelaskan kaitan demokrasi dengan PILKADA langsung sebagai sebuah entitas yang tak terpisahkan. Hasilnya adalah pasca PILKADA langsung masih banyak ditemui pelanggaran maupun penyimpangan yang dilakukan oleh kepala daerah dan jajarannya.

Namun dalam pemilihan secara langsung ini masih banyak kekurangan di dalamnya, seperti kurangnya dalam pengawasan saat pemilihan sedang berlangsung. Banyak beberapa oknum nakal yang melakukan kecurangan saat masa kampanye sudah dimulai. Mulai saat pertama kali pemilihan langsung terjadi di Indonesia sudah banyak yang melakukan hal buruk ini. Menurut laporan Bawaslu, Dalam setiap pemilu atau PILKADA, Bawaslu sering kali melaporkan adanya temuan terkait politik uang, mulai dari distribusi uang hingga barang seperti, sembako, baju, dan uang untuk memengaruhi pemilih. pelaku politik uang akan dijerat Pasal 187 A Undang-undang Pemilihan yang merujuk pada tindak menjanjikan atau memberikan uang sebagai imbalan untuk membuat pemilih tidak menggunakan hak pilih dengan ancaman sanksi pidana berupa hukuman penjara paling singkat 36 bulan atau paling lama 72 bulan dengan denda sedikitnya Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar (Bagja, 2024).

Pemilihan secara langsung di Lampung juga terjadi pertama kali yaitu pada 2008, yang di menangi oleh bapak Sjachroedin Zainal Pagar alam dan wakilnya Joko Umar Said yang berangkat melalui partai PDI-P. Dewantara & Nurgiansah (2021) mengatkan, pemilu merupakan hal yang wajib untuk sebuah negara yang menganut demokrasi. Demokrasi dipilih karena sejalan dengan aturan yang terdapat di dalam ideologi negara, yakni Pancasila dalam (Prasetyo dkk., 2022).

Partai Gerindra pertama kali berani untuk memajukan calonnya di provinsi Lampung pada tahun 2024 dengan memajukan nama Rahmat Mirzani Djausal berpasangan dengan Jihan Nurlela. Fungsi partai menurut Efriza (2019) adalah sebagai kepentingan, Pendidikan politik, kaderisasi, dan rekrutmen (Watoni & Puspitarini, 2022). Pada tahun 2024 PILKADA lampung berlangsung, terdapat beberapa kandidat termasuk Arinal Djunaidi dan Sutono, yang di usung oleh partai PDI-P. Proses pemilihan berlangsung pada tanggal 27 November 2024, di mana kedua pasangan calon saling bersaing untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Dalam kampanye mereka, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela aktif berinteraksi dengan warga di berbagai daerah di Lampung, menciptakan koneksi langsung dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Dengan latar belakang Rahmat sebagai Ketua DPD Gerindra Lampung dan Jihan sebagai seorang dokter serta mantan anggota DPD RI, pasangan ini memiliki kombinasi pengalaman politik dan profesional yang kuat untuk memimpin provinsi Lampung ke arah yang lebih baik.

Pada bulan Januari 2024, Rahmat Mirzani Djausal mengalami tantangan besar dalam hal popularitasnya, yang masih tergolong rendah. Menurut laporan dari Pikiran Rakyat Jabar, nama Mirza masih jauh tertinggal dibandingkan pesaingnya, Arinal Djunaidi. Namun, tim kampanye Mirza-Jihan merespons situasi ini dengan strategi yang inovatif dan agresif. Mereka melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dan kampanye yang intensif, yang berhasil meningkatkan elektabilitas pasangan tersebut menjelang PILKADA.

Dalam waktu singkat, popularitas Rahmat Mirzani Djausal melonjak signifikan, dari 43,7% pada Juli 2024 menjadi 73,5% pada pertengahan Oktober 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai mengenali dan mendukungnya lebih luas. Tingkat kedukaan terhadap Mirza juga meningkat pesat. Dari 80,6% di bulan Juli, kini mencapai 90%. Meskipun

Jihan Nurlela hanya dikenal oleh 56,9% responden, tingkat kedesukaannya mencapai 93% di kalangan mereka yang mengenalnya. Citra personal Rahmat Mirzani Djausal juga mendapatkan penilaian positif dari masyarakat. Ia dianggap lebih perhatian terhadap rakyat dan memiliki integritas yang baik dibandingkan dengan Arinal Djunaidi. Tim kampanye Mirza-Jihan melakukan sosialisasi yang lebih intensif daripada tim Arinal. Banyak responden melaporkan pernah bertemu langsung dengan Mirza atau melihat namanya di berbagai media.

Pasangan Mirza-Jihan berhasil meraih hasil signifikan, perolehan suara mencapai sekitar 82,54%, menjadikannya sebagai pemenang yang jelas dalam kontestasi ini. Mereka unggul jauh dari pesaingnya, Arinal- Sutono, yang hanya memperoleh sekitar 17,46% suara. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan dukungan kuat dari partai politik yang mengusung mereka, tetapi juga menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap visi dan program kerja yang ditawarkan oleh pasangan Mirza-Jihan.

Berikut adalah Tabel perolehan suara resmi yang dihitung oleh KPU pada PILKADA Provinsi Lampung 2024.

Tabel 1 Perolehan suara PILKADA Provinsi Lampung 2024.

No.	Kota/Kabupaten	Arinal-Sutono	Mirza-Jihan
1.	Kota Bandar Lampung	49.687	322.704
2.	Kota Metro	15.797	69.709
3.	Lampung Barat	27.910	116.994
4.	Lampung Selatan	77.822	399.234
5.	Lampung Tengah	85.11	492.779
6.	Lampung Timur	101.476	386.739
7.	Lampung Utara	46.940	263.316
8.	Mesuji	11.547	107.317
9.	Pesawaran	62.568	168.545
10.	Pesisir Barat	19.899	72.104
11.	Pringsewu	35.744	179.475
12.	Tanggamus	37.275	264.036
13.	Tulang Bawang	29.499	159.116
14.	Tulang Bawang Barat	33.238	114.661
15.	Way Kanan	56.519	183.052

TOTAL	605.921	3.299.781
-------	---------	-----------

Sumber: KPU Provinsi Lampung

Dalam Tabel data 1, terlihat bahwa pasangan calon Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela, yang diusung oleh Partai Gerindra, berhasil unggul telak atas lawan mereka, pasangan Arinal Djunaidi dan Sutono. Kemenangan ini tidak lepas dari strategi kampanye yang berhasil dan kemampuan mereka untuk meyakinkan masyarakat melalui visi dan misi yang jelas serta relevan dengan kebutuhan warga Lampung.

Kampanye adalah penyampaian pesan-pesan yang tertuju pada khalayak yang disampaikan dalam bentuk poster, spanduk, papan reklame, pidato, iklan diskusi, sehingga selebaran (Venus, 2004) dalam (Ardha, 2014). Strategi kampanye Mirza-Jihan mencakup kunjungan ke berbagai daerah, interaksi langsung dengan pemilih, serta penyampaian program-program yang berfokus pada perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam pernyataannya, Mirza menyatakan bahwa perolehan suara yang signifikan ini mencerminkan harapan besar masyarakat Lampung, dan ia berkomitmen untuk bekerja maksimal agar tidak mengecewakan kepercayaan tersebut. Dukungan mayoritas partai politik dan pendekatan kampanye yang terencana, pasangan Mirza-Jihan berhasil mengalahkan petahana dalam kontestasi ini, menandakan perubahan signifikan dalam peta politik di Lampung.

Dalam kampanye yang dilakukan oleh pasangan Mirza-Jihan, mereka tidak terlepas dari strategi yang disusun oleh partai pengusung mereka, yaitu Partai Gerindra. Soemarno (2002:15) mengatakan bahwa Komunikasi politik adalah proses dan kegiatan yang membentuk sikap dan perilaku politik dalam sistem politik, menggunakan hal-hal bermakna (Muchtar, 2016). Partai Gerindra mengajak kader-kader *influencer* untuk mendukung pasangan Mirza-Jihan dengan cara menghadirkan mereka ke Provinsi Lampung. Kehadiran para *influencer* ini diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat dan meningkatkan dukungan terhadap pasangan calon dalam kampanye mereka. Dengan memanfaatkan pengaruh dan jangkauan

luas yang dimiliki oleh para *influencer*, Partai Gerindra berupaya untuk memperkuat pesan kampanye dan menjangkau lebih banyak pemilih, terutama generasi muda yang aktif di media sosial. Partai Gerindra mengadakan serangkaian konsolidasi untuk memperkuat dukungan terhadap calon gubernur yang diusung, Rahmat Mirzani Djausal. Dalam konsolidasi tersebut, seluruh kader partai diinstruksikan untuk bekerja sama dan menjaga soliditas dalam menghadapi kompetisi politik yang ketat. Berikut nama-nama *influencer* yang ikut mendukung Rachmat Mirzani Djausal:

Tabel 2. Nama-nama *Influencer*

Nama <i>Influencer</i>
Raffi Ahmad & Nagita Slavina
Marsel Widiyanto
Celine Evangelista
Ria Ricis
Charly Van Houten
Paula Verhoeven
Rizal Ruguk Adiphaty (Bang Taun)
Aldi Jieh (Mak Jieh)

Strategi ini mencakup penggalangan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk *influencer* dan tokoh lokal, untuk meningkatkan popularitas pasangan Mirza-Jihan di kalangan pemilih. Dalam konsolidasi tersebut, seluruh kader partai diinstruksikan untuk bekerja sama dan menjaga soliditas dalam menghadapi kompetisi politik yang ketat.

Strategi yang diterapkan oleh Partai Gerindra sangatlah krusial dalam konteks PILKADA Lampung. Schroeder (2003:5) dalam (Watoni & Puspitarini, 2022) mengatakan strategi politik adalah strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan politik. Melalui perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terorganisir, pasangan Mirza-Jihan berhasil meraih kemenangan signifikan hanya dalam satu putaran. Menurut Budiatri (2015)

partai politik merupakan pilar demokrasi yang berakar dari legitimasi sosial masyarakat setempat dalam (Watoni & Puspitarini, 2022).

Partai Gerindra telah mengambil langkah strategis penting dengan menggaet sejumlah partai politik untuk membentuk koalisi yang lebih kuat. Dalam upaya ini, Gerindra berhasil menarik dukungan dari Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora, Garuda, dan Prima. Koalisi tersebut bisa dikenal sebagai koalisi KIM PLUS atau koalisi Indonesia maju. Sejalan dengan koalisi tersebut, Cangara (2009), mengartikan komunikasi politik sebagai suatu bidang yang memperhatikan perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai arti politik atau berpengaruh terhadap perilaku politik (Muchtar, 2016).

Dengan dukungan dari berbagai partai ini, Gerindra berharap dapat memperkuat posisi mereka dalam menghadapi PILKADA 2024. Peta koalisi yang terus berkembang menunjukkan dinamika politik yang semakin

menarik menjelang pemilu mendatang, di mana setiap partai berusaha untuk memaksimalkan peluang dan kekuatan mereka di kancah politik nasional, salah satunya provinsi Lampung.

Penulis mengambil topik ini karena ingin meneliti komunikasi partai politik dalam konteks PILKADA guna memahami bagaimana partai merancang dan melaksanakan strategi kampanye untuk memenangkan kandidatnya. Penelitian ini penting untuk mengkaji berbagai aspek komunikasi, mulai dari pesan yang disampaikan kepada publik, media yang digunakan dalam penyebaran informasi, hingga metode pendekatan yang dilakukan untuk menjangkau dan memengaruhi pemilih. Dengan memahami proses komunikasi tersebut, penulis berharap dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang peran komunikasi politik dalam keberhasilan sebuah kampanye serta dampaknya terhadap perilaku pemilih.

Melalui penelitian ini, penulis berupaya menggali bagaimana partai politik menyesuaikan strategi komunikasi mereka dengan dinamika sosial dan

politik lokal, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan media sosial yang kini semakin dominan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dampak komunikasi partai terhadap persepsi dan keputusan pemilih, sehingga dapat memberikan wawasan penting bagi pengembangan strategi kampanye yang lebih berhasil di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi kalangan akademisi, tetapi juga bagi praktisi politik dan masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam proses demokrasi di tingkat daerah.

Hasil penelitian sebelumnya menjadi informasi dasar yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan survei yang dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Berikut beberapa jurnal yang menjadi referensi untuk penulis. Pertama, dalam penelitian (Maharani, 2019), Penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan Herman Deru dan Mawardi Yahya telah menerapkan semua 4 strategi pemenangan yang diajukan oleh Kotten. Strategi mereka berbeda dengan yang digunakan oleh pasangan lain, terutama dalam program dan cara kampanye melalui media sosial. Selain itu, ada 4 tahapan proses kampanye yang ditetapkan oleh KPU Sumatera Selatan pada PILKADA Sumatera Selatan periode 2018–2023, yaitu debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, dan iklan kampanye di media.

Kedua, di dalam penelitian (Muchtar, 2016), Pembahasan mengenai pencitraan partai politik ini mengambil contoh dari Partai Golkar yang berusaha meningkatkan citra partainya melalui beberapa langkah. Pertama, mereka mengusung motto "*The Party of Idea*," yang bertujuan untuk menggambarkan Golkar sebagai partai yang dinamis, dipenuhi oleh berbagai gagasan dan ide dari kader-kadernya. Kedua, untuk mencitrakan diri sebagai partai kosmopolitan, Golkar melakukan kunjungan ke luar negeri untuk bertemu dengan para pemimpin partai dan negara. Ketiga, mereka menyampaikan pidato politik yang mengedepankan pemikiran dan ide-ide kontemporer melalui orasi yang disampaikan oleh ketua umum.

Ketiga, dalam penelitian (Trianziani, 2020), Modalitas menurut Bourdieu (1986) yang dimiliki seseorang terdiri modal ekonomi, social, budaya, dan modalitas politik. Temuan penelitian menggambarkan berbagai modalitas tersebut dimanfaatkan oleh pasangan James Sumendap. SH, dan Drs. Jesaja Jocke Legi, untuk merebut dukungan dari masyarakat pemilih dan juga dukungan dari partai politik. Bahkan keunggulan kepemilikan berbagai modalitas tersebut, membuat pasangan ini tidak memiliki lawan, sehingga hanya melawan kotak kosong, pada saat PILKADA tahun 2018.

Keempat, di dalam penelitian (Triwicaksono & Nugroho, 2021), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik yang diterapkan oleh pasangan calon kepala daerah mempertimbangkan karakteristik dari komponen komunikasi, yaitu komunikator, isi pesan, media, komunikan, dan umpan balik. Pertimbangan dalam komunikasi tersebut berkontribusi pada kemenangan pasangan calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah Semarang tahun 2020.

Kelima, dalam penelitian (Manar, 2018), Diperlukan evaluasi ulang terhadap sistem demokrasi di Indonesia agar PILKADA langsung dapat terintegrasi dengan subsistem lain yang dapat mendukung demokrasi Indonesia dengan lebih berhasil. Demokrasi dianggap baik dan berhasil jika setiap subsistem pendukungnya berfungsi dengan baik serta menghasilkan output yang terarah, terukur, dan sesuai dengan harapan publik.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat disusun berdasarkan pendahuluan di atas adalah:

Bagaimana strategi komunikasi pemenangan partai gerindra dalam pemenangan Gubernur Lampung tahun 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan Masalah di atas, maka Tujuan Penelitian ini adalah:

Untuk menganalisis strategi komunikasi yang digunakan oleh Partai

Gerindra dalam kemenangan Gubernur Lampung pada PILKADA Serentak 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana komunikasi politik berlangsung di dalam partai. Penelitian ini juga memberikan wawasan mengenai interaksi komunikasi politik antara Partai Gerindra dan kader-kadernya.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca yang tertarik pada dunia politik mengenai jenis komunikasi yang terjadi antara Partai Gerindra dan kader-kadernya menjelang PILKADA.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Strategi Komunikasi Politik

2.1.1. Definisi Startegi Komunikasi

Strategi sebenarnya berasal dari bahasa Yunani “*strategos*” diambil dari kata *stratos* yang berarti militer dan *ag* yang berarti memimpin. Menurut Kotten seperti yang dijelaskan (Salusu 2006:104–105) Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*) adalah suatu pendekatan yang merancang rencana dengan memperhatikan misi, tujuan, dan inisiatif strategis terkini dari suatu organisasi. Jadi strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai general ship yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang.

Strategi komunikasi politik berkaitan dengan proses yang berlangsung dalam memenangkan sebuah pertarungan politik, baik oleh partai politik maupun secara langsung oleh calon legislatif atau calon pemimpin daerah. Tujuannya adalah untuk meraih kekuasaan dan pengaruh yang sebesar-besarnya di antara masyarakat sebagai konstituennya (Pattiasina, 2015).

Strategi menurut Jones (2009) menjelaskan bahwa strategi komunikasi bukanlah suatu proses yang bersifat pasif, yang berfokus pada penyampaian pesan yang paling sesuai untuk publik atau untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Sebaliknya, ini adalah proses komunikasi yang aktif dan melibatkan partisipasi *public* (Pratiwi dkk., 2018).

Selama perjalanan sejarahnya, komunikasi telah berkembang secara signifikan, terkait erat dengan evolusi strategi komunikasi:

1. Periode Tradisi Retorika: Periode ini dimulai pada zaman Yunani Kuno, ketika komunikasi dipandang sebagai suatu bentuk seni. Aristoteles menjadi tokoh sentral dengan konsep tiga elemen penting

dalam retorika, yaitu *ethos* (kredibilitas), *pathos* (emosi), dan *logos* (fakta). Dalam konteks ini, komunikasi dianggap sebagai aktivitas verbal yang bertujuan untuk memengaruhi audiens.

2. Periode Pertumbuhan (Masa Jurnalistik): Setelah Perang Dunia II, muncul berbagai teknologi komunikasi baru seperti telepon dan radio. Pada masa ini, surat kabar mulai berkembang pesat sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada publik.
3. Periode Konsolidasi: Setelah Perang Dunia II, ilmu komunikasi mengalami konsolidasi sebagai disiplin ilmu sosial yang multidisipliner. Para ilmuwan dari berbagai bidang mulai mengembangkan teori-teori komunikasi, termasuk dari perspektif psikologi dan sosiologi.
4. Periode Teknologi Komunikasi: Sejak tahun 1960-an hingga saat ini, terjadi integrasi antara retorika, jurnalistik, dan media massa. Perkembangan teknologi informasi sangat berpengaruh dalam memperluas jangkauan serta meningkatkan efektivitas komunikasi.

Menurut Abdullah, strategi komunikasi politik adalah suatu rencana yang mencakup metode, teknik, dan pengaturan hubungan fungsional antara berbagai unsur dan faktor dalam proses komunikasi. Rencana ini bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional yang melibatkan unsur-unsur dan faktor-faktor tersebut guna mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan (Pattiasina, 2015).

Ada 3 (tiga) tahap dalam melakukan strategi, yaitu:

- a) Perumusan Strategi
- b) Pelaksanaan Strategi
- c) Evaluasi Strategi

Penelitian ini menggunakan teori strategi yang dikemukakan oleh Kotten sebagai landasan untuk menganalisis perencanaan dan implementasi strategi yang dilakukan. Teori ini dipilih karena mampu memberikan kerangka kerja yang komprehensif dalam memahami bagaimana suatu organisasi merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tipe-tipe strategi yang dijelaskan oleh Kotten (Aliyah dkk., 2022) adalah sebagai berikut:

1. Strategi Organisasi

Tipe strategi pertama berkaitan erat dengan visi, misi, dan tujuan organisasi, yang dalam konteks partai politik memegang peranan sangat penting dalam menentukan arah dan orientasi perjuangan politik jangka panjang. Visi partai politik pada dasarnya merupakan cerminan dari ideologi, pandangan hidup, serta cita-cita politik yang ingin diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi tersebut biasanya bersifat ideal dan mencerminkan masa depan yang diharapkan oleh partai, baik dalam aspek sosial, ekonomi, hukum, budaya, maupun tata kelola pemerintahan. Sementara itu, misi partai menjabarkan langkah-langkah strategis dan operasional yang harus ditempuh untuk merealisasikan visi tersebut, seperti meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan keadilan sosial, memperkuat demokrasi, atau memberantas korupsi. Oleh karena itu, strategi yang disusun berdasarkan visi dan misi ini menjadi fondasi utama dalam menentukan kebijakan, arah perjuangan, serta tindakan konkret partai dalam setiap tahapan politik. (Aliyah dkk., 2022)

Strategi berbasis visi dan misi ini biasanya dirumuskan secara sistematis dan dituangkan dalam berbagai dokumen resmi partai, seperti platform politik, manifesto, AD/ART, hingga rencana kerja strategis lima tahunan yang disusun menjelang pemilu. Dalam dokumen tersebut, partai politik menetapkan prioritas isu-isu yang akan diperjuangkan, target politik yang ingin dicapai, serta pendekatan dan metode kampanye yang akan digunakan. Rencana strategis ini juga mencakup aspek penguatan internal partai, seperti kaderisasi, pendidikan politik, pengembangan organisasi di tingkat daerah, serta pembangunan citra publik. Hal ini menunjukkan bahwa strategi tidak hanya berkaitan dengan aspek eksternal seperti pemilu atau pencitraan, tetapi juga menyentuh aspek internal yang bersifat struktural dan ideologis. Dalam lembaga politik seperti partai, strategi yang selaras dengan visi dan misi menjadi kunci agar partai

tidak kehilangan arah, tidak pragmatis, dan tetap memiliki garis perjuangan yang jelas di tengah dinamika politik yang sangat cair. Secara eksternal, strategi ini menjadi pedoman dalam menyusun narasi politik, membangun komunikasi publik, serta menjalin koalisi strategis dengan partai lain atau kelompok masyarakat sipil. Dalam konteks demokrasi elektoral, strategi ini juga sangat menentukan posisi dan daya saing partai di tengah kontestasi politik, baik di tingkat nasional maupun daerah. (Aliyah dkk., 2022)

2. Strategi Program

Jenis strategi ini lebih menitikberatkan pada analisis terhadap dampak atau implikasi strategis dari suatu program. Artinya, ketika sebuah program dijalankan, fokus utama strategi ini adalah menilai sejauh mana program tersebut akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta apakah hasil yang dicapai benar-benar dirasakan positif oleh publik atau justru sebaliknya.

Menurut (Aliyah dkk., 2022) strategi ini mendorong partai politik untuk tidak sekadar memproduksi wacana populis demi meraih simpati pemilih, tetapi benar-benar merancang program-program yang realistis, terukur, dan berorientasi pada solusi. Dengan demikian, partai dituntut untuk melakukan kajian kebijakan secara matang, termasuk memperhatikan kapasitas fiskal, dukungan kelembagaan, serta potensi tantangan implementasi di lapangan. Strategi ini juga mencerminkan tingkat kedewasaan politik partai, karena menunjukkan bahwa partai tidak hanya berpikir jangka pendek untuk memenangkan pemilu, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan program-program yang ditawarkan mampu menciptakan perubahan positif dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, strategi ini penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap partai politik. Ketika masyarakat melihat bahwa setiap program yang dijalankan memiliki dampak yang jelas dan dirasakan langsung, maka citra partai akan semakin positif di mata pemilih. Hal ini menjadi modal sosial dan politik yang sangat

penting dalam mempertahankan loyalitas konstituen dan memperluas basis dukungan. Dalam jangka panjang, partai politik yang konsisten menerapkan strategi berbasis dampak akan lebih mudah membangun legitimasi dan memperoleh posisi yang kuat dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, penerapan strategi ini tidak hanya bermanfaat bagi keberhasilan partai secara elektoral, tetapi juga berkontribusi pada kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan nasional yang lebih baik.

3. Strategi Pendukung Sumberdaya

Menurut (Aliyah dkk., 2022) strategi ini berfokus pada pemanfaatan secara maksimal terhadap seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerjanya. Sumber daya tersebut dapat mencakup infrastruktur, tenaga kerja, teknologi, anggaran, serta elemen pendukung lainnya yang relevan dengan tujuan organisasi.

Partai politik yang mampu mengelola dan mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien akan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan partai lain. Misalnya, penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi komunikasi internal dan eksternal partai, memperluas jangkauan kampanye politik, serta membangun citra yang lebih modern dan responsif di mata pemilih muda. Demikian pula, penguatan kapasitas kader melalui pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan akan menghasilkan sumber daya manusia yang andal dan siap bersaing di arena politik lokal maupun nasional. Selain itu, kemampuan partai dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel juga menjadi indikator profesionalisme organisasi, yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik. (Aliyah dkk., 2022)

Dalam jangka panjang, strategi semacam ini akan memperkokoh fondasi partai politik sebagai institusi yang tidak hanya kuat secara elektoral, tetapi juga memiliki kapasitas kelembagaan yang solid dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkeadilan. Dengan demikian, strategi berbasis pengelolaan sumber daya yang terarah

dan berkelanjutan merupakan salah satu pilar penting dalam membangun partai politik yang profesional, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Strategi Kelembagaan

Jenis strategi kelembagaan ini menitikberatkan pada upaya peningkatan kapasitas dan kualitas organisasi dalam memaksimalkan pemanfaatan unsur-unsur kelembagaan. (Aliyah dkk., 2022)

Dalam praktiknya, strategi kelembagaan ini mendorong partai untuk melakukan reformasi internal, memperkuat tata kelola organisasi, dan membangun sistem kerja yang efisien. (Aliyah dkk., 2022)

Dengan demikian, strategi kelembagaan bukan hanya soal penguatan struktur internal, melainkan juga mencerminkan keseriusan partai dalam menjalankan fungsinya secara demokratis, akuntabel, dan berkelanjutan. Partai politik yang sukses menerapkan strategi ini akan memiliki daya tahan organisasi yang tinggi, mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan politik, serta lebih siap untuk berperan aktif dalam pemerintahan maupun sebagai oposisi yang konstruktif.

Berdasarkan berbagai pengertian strategi menurut para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa strategi sangat penting dalam berbagai aspek. Untuk mencapai kemenangan, strategi merupakan elemen yang sangat krusial. Dalam menyusun strategi, penting untuk mengaitkannya dengan lingkungan organisasi agar dapat dibangun kekuatan strategi yang berhasil. Selain itu, untuk mencapai tujuan organisasi, perlu dipertimbangkan berbagai alternatif strategi yang harus dipilih dengan cermat.

2.1.2. Fungsi Strategi Komunikasi Politik

Fungsi strategi komunikasi sangat penting dalam mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan, karena strategi ini memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk menyampaikan pesan dengan berhasil. Meskipun

demikian, peran dan fungsi strategi komunikasi dalam suatu lembaga atau aktivitas komunikasi sangat krusial untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Rosidi, 2017).

Menurut Thompson dalam (Rosidi, 2017), fungsi strategi komunikasi politik sebagai berikut:

1. Visi organisasi atau perspektif yang jelas harus dimiliki dan dijadikan pedoman dalam mengelola aktivitas komunikasi lebih lanjut.
2. Menetapkan serangkaian rencana yang berasal dari visi dan misi, perencanaan yang berhasil juga harus didasarkan pada kumpulan data dan informasi yang telah diperoleh.
3. Menetapkan taktik, yaitu langkah-langkah praktis yang perlu diambil, dengan mempertimbangkan kemampuan internal serta kondisi atau situasi di lapangan.
4. Menentukan posisi atau kedudukan organisasi serta program komunikasi dalam konteks lingkungan yang dihadapi, termasuk mengatur berbagai komponen komunikasi seperti komunikator, sumber, pesan, dan target sasaran.
5. Menyusun pola aktivitas komunikasi agar strategi menjadi jelas dan dapat diimplementasikan oleh semua pihak yang terlibat dalam komunikasi.

Dengan memahami dinamika strategi komunikasi politik dalam pemilihan umum di era digital, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi kandidat, partai politik, dan pengambil kebijakan dalam merancang kampanye yang lebih berhasil dan berdampak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan pengetahuan mengenai hubungan antara teknologi digital dan politik (Benediktus, 2022).

2.2. Tinjauan Pustaka Strategi Kampanye

2.2.1. Definisi Kampanye

Kampanye adalah salah satu bentuk komunikasi yang dapat digunakan

untuk mencapai tujuan tertentu, serta meningkatkan kesadaran dan pandangan masyarakat terhadap isu-isu penting yang sedang diperjuangkan (Priliantini dkk., 2020). Dalam konteks politik, kampanye biasanya dilakukan oleh para calon politisi untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan citra dirinya sendiri. Tujuan utama kampanye adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting dan mempengaruhi opini serta tindakan mereka. Selain itu, kampanye juga berfungsi untuk membangun keyakinan publik terhadap ideologi, kebijakan, dan kompetensi calon politisi tersebut. Melalui berbagai cara komunikasi yang berhasil, kampanye bertujuan agar masyarakat lebih sadar dan partisipatif dalam proses demokratisasi, sehingga hasil pemilihan bisa lebih representatif dan bermoral.

Kampanye politik merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi politik dengan tujuan utama untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Menurut (Fatimah, 2018) Kampanye politik dipahami sebagai usaha yang terstruktur untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan di dalam kelompok tertentu.

Dalam konteks demokrasi, kampanye ini berfungsi sebagai jembatan antara calon pemimpin dan pemilih, memungkinkan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program mereka secara langsung. Melalui berbagai strategi komunikasi yang terencana, seperti penggunaan media sosial, iklan, debat publik, dan pertemuan langsung, kampanye bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap isu-isu penting serta mempengaruhi opini publik. Dengan demikian, kampanye politik tidak hanya berfokus pada mendapatkan suara dalam pemilihan umum, tetapi juga berperan dalam membentuk dialog yang konstruktif antara calon pemimpin dan konstituen mereka.

Dalam sebuah kontestasi pemilihan kepala daerah PILKADA, pasangan calon harus melaksanakan kampanye yang berhasil untuk meraih kemenangan. Kampanye ini menjadi sarana penting bagi calon untuk memperkenalkan diri, menyampaikan visi dan misi, serta menjelaskan

program-program yang akan mereka jalankan jika terpilih. Melalui berbagai strategi komunikasi, seperti pertemuan langsung dengan warga, penggunaan media sosial, dan iklan di berbagai platform, pasangan calon dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan pendekatan yang tepat, kampanye tidak hanya dapat meningkatkan elektabilitas pasangan calon, tetapi juga menciptakan dialog yang konstruktif antara calon dan pemilih, sehingga menghasilkan dukungan yang solid dalam kontestasi PILKADA.

2.2.2. Tujuan Kampanye Politik

Untuk meraih kemenangan dalam pemilu tertentu, setiap calon perlu mempertimbangkan strategi dan perencanaan yang matang. Kedua aspek ini sangat krusial karena dapat menentukan keberhasilan calon dalam proses pemilihan umum atau PILKADA (Fatimah, 2018). Tujuan dari komunikasi politik adalah untuk menjalin kedekatan dengan masyarakat, sehingga melalui komunikasi tersebut, masyarakat dapat lebih mudah mengenal calon pemimpin mereka (Aryadillah & Fitriansyah, 2022).

Cangara dalam (Aryadillah & Fitriansyah, 2022) menyatakan bahwa terdapat empat jenis strategi yang dapat diterapkan dalam konteks kampanye politik yaitu:

1. Penetapan komunikator sebagai aktor utama dalam aktivitas komunikasi menunjukkan bahwa mereka memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, seorang komunikator yang berfungsi sebagai juru kampanye harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik, kaya akan ide, dan dipenuhi dengan daya kreativitas.
2. Menetapkan target sasaran dalam studi komunikasi juga dikenal sebagai khalayak. Memahami masyarakat, terutama yang akan menjadi target dalam kampanye, sangatlah penting.
3. Menyusun pesan-pesan kampanye perlu dilakukan dengan baik agar pesan tersebut dapat dikelola dan disampaikan secara berhasil.
4. Pemilihan media Jenis-jenis media yang dapat digunakan dalam kampanye politik meliputi media cetak, media elektronik, media luar

ruangan, media ruang kecil dan saluran tatap muka langsung dengan masyarakat.

Dengan demikian, kampanye tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mempengaruhi dan membentuk opini serta tindakan masyarakat terhadap isu-isu yang relevan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat secara aktif dalam diskusi dan tindakan terkait isu-isu yang diangkat.

2.2.3. Strategi Kampanye Politik

Strategi harus dicapai dengan seoptimal mungkin untuk memastikan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mencapai tingkat maksimal tersebut, penting untuk memahami berbagai tipe strategi yang ada. Setiap tipe strategi memiliki peran dan fungsi yang berbeda, sehingga pemilihan dan penerapannya harus disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan organisasi.

Menurut Dhakidea dalam (Benodkk., 2022), diperlukan langkah- langkah untuk melakukan restrukturisasi dan revitalisasi. Restrukturisasi bertujuan untuk memperbaiki organisasi di setiap tingkatan, mulai dari pusat hingga cabang, dengan mempertimbangkan kondisi objektif Partai Keadilan Sejahtera di setiap levelnya. Ada dua tipe strategi komunikasi politik menurut Pattiasina (2015) yaitu:

1. Strategi komunikasi politik yang cenderung mengambil (membentuk) posisi horizontal, menurut (Pattiasina, 2015), Dalam konteks ini, posisi antara komunikator politik dan komunikan (masyarakat) berada dalam keadaan yang relatif seimbang, di mana keduanya saling memberi dan menerima. Hal ini menghasilkan proses berbagi informasi, dan bentuk strategi semacam ini mencerminkan nilai-nilai demokratis.
2. Strategi komunikasi politik yang cenderung membentuk pola linier. Aliran komunikasi (informasi) yang bersifat satu arah cenderung

berlangsung secara vertikal (*top down*). Bentuk komunikasi seperti ini mencerminkan nilai-nilai budaya feodal dan kepemimpinan yang otoriter (Pattiasina, 2015).

Dengan mengidentifikasi dan menerapkan tipe-tipe strategi yang tepat, organisasi dapat memanfaatkan sumber daya secara efisien, mengatasi tantangan yang ada, dan meningkatkan peluang untuk meraih keberhasilan. Oleh karena itu, pengembangan strategi yang komprehensif dan terencana menjadi kunci untuk mencapai hasil yang maksimal.

2.3. PILKADA

2.3.1. Definisi PILKADA

Pemilihan Kepala Daerah PILKADA di Indonesia adalah proses demokratis yang memungkinkan warga negara memilih pemimpin daerah secara langsung, seperti Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dilaksanakan setiap lima tahun, PILKADA diatur oleh Undang-Undang dan dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan keadilan dan transparansi.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang selanjutnya disebut sebagai Pemilihan Kepala Daerah PILKADA, merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Kepala Daerah secara langsung dan demokratis (Lestari, 2019).

Sejarah Pemilihan Kepala Daerah PILKADA di Indonesia telah mengalami banyak perubahan penting sejak periode kemerdekaan. Indonesia dikenal memiliki dua sistem penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah PILKADA, yaitu PILKADA secara tidak langsung yang diterapkan pada masa awal kemerdekaan, dan PILKADA secara langsung yang mulai dilaksanakan setelah era reformasi (Nugraha & Mulyandari, 2016). Berikut adalah beberapa perubahan PILKADA di Indonesia:

1. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, pengaturan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang No.

22 tahun 1948. Undang-undang ini menyebutkan bahwa kepala daerah dapat diangkat oleh presiden atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

2. Pada tahun 2004, diterapkan Undang-Undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengubah sistem pemilihan menjadi lebih demokratis dengan memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih kepala daerah secara langsung.

Perubahan-perubahan ini mencerminkan upaya yang dilakukan untuk memperkuat demokrasi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah di Indonesia. Awalnya, pemilihan kepala daerah tidak langsung, yaitu dipilih oleh DPRD, namun sekarang telah berganti menjadi pemilihan kepala daerah langsung (Jamaludin, 2019). Hal ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel terhadap rakyat.

2.3.2. Tujuan PILKADA

Tujuan Pemilihan Kepala Daerah PILKADA di Indonesia adalah untuk mewujudkan prinsip demokrasi di tingkat daerah, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Terdapat sebuah anekdot yang menyebutkan bahwa negara ini dikenal sebagai negeri PILKADA (Jamaludin, 2019). Menurut Surbakti dalam (Hamdi dkk., 2022) Tujuan pemilihan adalah :

1. Sebagai mekanisme untuk memilih para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan publik, demokrasi menempatkan kedaulatan pada posisi yang tinggi, sehingga mencerminkan semangat "dari, oleh, dan untuk rakyat.
2. Merupakan mekanisme untuk mengalihkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memperoleh kursi, sehingga integritas dan kesatuan masyarakat dapat terjaga.

3. Pemilihan umum adalah sarana untuk memobilisasi, menggerakkan
Pemilihan umum adalah sarana untuk memobilisasi, menggerakkan,
atau menggalang dukungan masyarakat terhadap negara dan
pemerintahan melalui partisipasi dalam proses politik.

Selain itu, PILKADA diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mendorong pembangunan daerah yang berhasil, dan memperkuat akuntabilitas serta transparansi dalam pemerintahan. Melalui PILKADA, diharapkan juga dapat membangun kesadaran politik dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, sehingga menciptakan hubungan yang lebih dekat antara pemimpin dan warganya.

2.3.3. Prosedur PILKADA

PILKADA secara langsung akhirnya menggantikan sistem PILKADA tidak langsung, yang didorong oleh semangat untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah dengan cara yang lebih demokratis (Suyatno, 2016). Dalam pelaksanaan pemilihan PILKADA, terdapat prosedur yang telah ditetapkan dan harus diikuti dengan ketat. Prosedur ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari pendaftaran calon, kampanye, hingga penghitungan suara. Setiap langkah dalam proses ini dirancang untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pemilihan.

Tahapan pelaksanaan PILKADA yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang cukup panjang dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk suasana persaingan antar kandidat yang semakin intens, yang berpotensi meningkatkan risiko konflik di antara para pendukung (Harahap, 2019). Tahapan Menurut Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 68 Tahun 2024:

1. Tahapan Persiapan
 - a) Perencanaan program dan anggaran.
 - b) Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan.

- c) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan.
- d) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS.
- e) Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, panitia Pengawas lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
- f) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan.
- g) Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih.
- h) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

2. Tahapan Penyelenggaraan

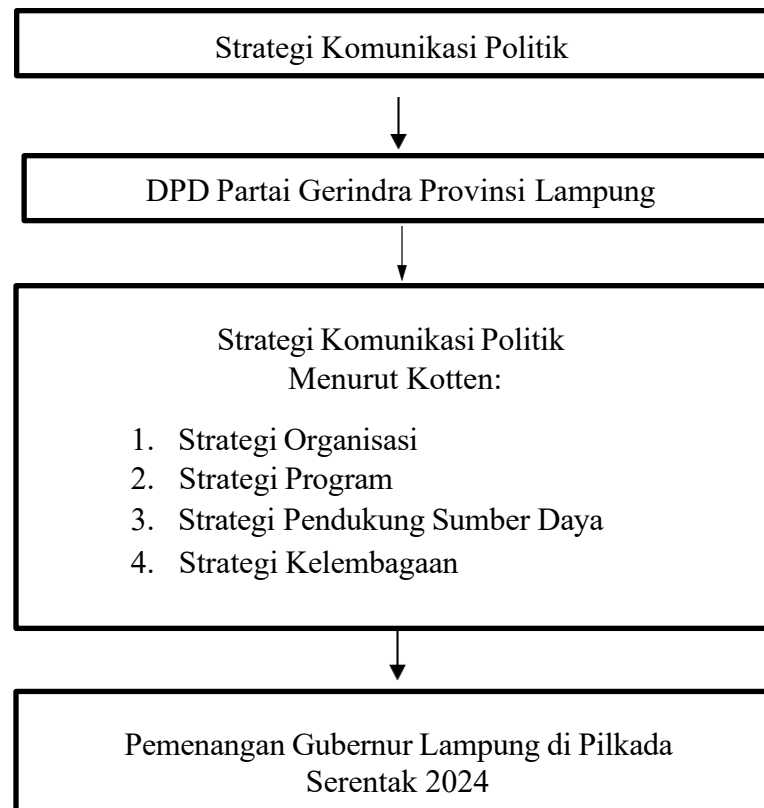
- a) Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
- b) Pendaftaran Pasangan Calon.
- c) Penelitian persyaratan Calon.
- d) Penetapan Pasangan Calon.
- e) Pelaksanaan Kampanye.
- f) Pelaksanaan pemungutan suara.
- g) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- h) Penetapan calon terpilih.
- i) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan.
- j) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Selain itu, regulasi yang jelas bertujuan untuk melindungi hak suara masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dari semua lapisan. Dengan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan, diharapkan PILKADA dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin daerah yang benar-benar mewakili harapan rakyat.

2.4. Kerangka Pikir

Penelitian ini menggunakan teori Kotten dengan empat strategi: organisasi, program, sumber daya, dan kelembagaan.. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, dan dokumentasi. Sehingga

dalam penelitian ini yang berdasarkan dari teori dan latar belakang, kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: Diolah Peneliti

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Data

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Secara fundamental, penelitian kualitatif bersifat eksploratif dan menghasilkan data deskriptif yang disampaikan dalam bentuk bahasa tertulis, lisan, atau gambar, bukan dalam bentuk angka. Dalam penelitian kualitatif, posisi narasumber sangat krusial, tidak hanya sebagai pemberi respons, tetapi juga sebagai pemilik informasi (Wakarmamu, 2021).

Jenis penelitian deskriptif ini biasanya dilakukan pada satu variabel yang diteliti dengan menguraikan secara rinci sesuai dengan masalah penelitian yang diinginkan. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan karakteristik suatu populasi atau fenomena tertentu. Suyitno (2018) mengatakan, deskripsi rinci adalah jenis penelitian kualitatif yang bertujuan memahami dan menginterpretasikan subjek, serta menyajikan gejala yang tampak dan makna di baliknya.

Metode pengumpulan data dalam penelitian deskriptif kualitatif meliputi berbagai teknik yang dirancang untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Beberapa teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data paling umum dalam penelitian kualitatif. Peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber untuk menggali informasi yang relevan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi mencakup pengumpulan data dari dokumen tertulis, catatan, arsip atau media lainnya yang berkaitan dengan topik

penelitian. Dokumentasi ini termasuk laporan, jurnal, atau hasil rapat yang memberikan konteks tambahan untuk analisis.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang digunakan oleh penulis Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Penulis memilih menggunakan penelitian kualitatif karena pendekatan ini lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik penelitian yang akan dilakukan. Fokus pada penelitian ini adalah Pada Strategi Komunikasi Politik Partai Gerindra Dalam Pemenangan Gubernur Lampung Pada PILKADA Serentak 2024 . Dengan menggunakan empat strategi komunikasi yang di sampaikan oleh Kotten dalam (Aliyah dkk., 2022), yaitu:

1. Strategi Organisasi
Strategi tipe pertama berhubungan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi, yang umumnya dirumuskan melalui dokumen perencanaan strategis atau rencana jangka panjang lembaga.
2. Strategi Program
Strategi ini fokus pada dampak strategis dari suatu program, dengan mempertimbangkan apakah masyarakat akan merasakan manfaat positif dari pelaksanaannya atau tidak
3. Strategi Pendukung Sumber Daya
Strategi ini menekankan pemanfaatan maksimal sumber daya yang ada guna meningkatkan kinerja organisasi.
4. Strategi Kelembagaan
Strategi kelembagaan ini berfokus pada peningkatan kapasitas organisasi dalam memaksimalkan suatu organisasi

3.3. Lokasi Dan Waktu

Lokasi yang di ambil oleh penulis dalam penilitian ini adalah Kantor DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung, selanjutnya waktu yang telah direncanakan oleh penulis adalah saat kader Gerindra Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela sudah di nyatakan menang yaitu pada Februari-Mei 2025.

3.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian sangatlah penting, karena keberhasilan suatu penelitian sangat bergantung pada kevalidan dan kualitas data yang digunakan. Data yang valid memberikan landasan yang kuat untuk analisis dan interpretasi hasil, sehingga kesimpulan yang diambil menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, peneliti harus memastikan bahwa sumber data yang digunakan berasal dari sumber yang kredibel dan relevan dengan topik yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya untuk tujuan penelitian tertentu. Proses pengumpulan data primer melibatkan metode seperti wawancara, survei, observasi, dan eksperimen, di mana peneliti berinteraksi langsung dengan responden atau objek penelitian. Untuk mendapatkan data primer, peneliti memanfaatkan panduan wawancara untuk melaksanakan teknik wawancara mendalam (Triwicaksono & Nugroho, 2021).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung, yang mencakup buku, catatan, dokumen yang sudah ada, atau arsip (Maharani, 2019). Data ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk publikasi pemerintah, jurnal ilmiah, atau hasil penelitian sebelumnya. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi tambahan yang dapat memperkaya analisis dan hasil penelitian mereka.

3.5. Informan Penelitian

Teknik pengambilan informasi dari sumber data dilakukan dengan menentukan seseorang sebagai di anggap paling mengetahui informasi yang

kita harapkan sehingga lebih memudahkan peneliti dalam mendapatkan suatu informasi disebut dengan *purposive sampling*. Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa individu yang dipilih memiliki informasi yang dibutuhkan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengeksplorasi objek penelitian. Informan penelitian dipilih dari berbagai unsur yang dianggap relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini (Muchtar, 2016). Daftar informan yang akan di wawancara peneliti yaitu:

Tabel 3. Informan

No.	Bidang	Nama	Alasan
1.	Tim Pemenangan	MAA. Imam Santoso	Peran sebagai tim sukses
2.	Kader Partai	Fauzi Heri	Peran sebagai tim sukses
3.	Tokoh Adat	Ike Edwin	Tokoh Masyarakat Lampung
4.	Pengamat Politik	Bendi Juantara	Posisi sebagai Pengamat Politik.
5.	Akademisi	Budi Harjo	Pengetahuan
6.	Pemilih	Masyarakat	Posisi Sebagai Pemilih

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Muchtar, 2016), Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, analisis data dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana data yang diperoleh dari penelitian disajikan dalam bentuk kalimat yang akurat dan jelas. Berkaitan dengan masalah yang akan di teliti hal ini akan dilakukan dengan sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Tipe penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang mencakup wawancara dan pengumpulan fakta. Tujuan dari tipe penelitian ini adalah untuk melakukan studi yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis (Maharani, 2019).

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang berguna untuk kelengkapan data-data yang diperoleh sebelumnya. Wawancara akan dilakukan penulis dengan beberapa kader dari Partai Gerindra yang memiliki andil dalam kemenangan Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela.

2. Metode Dokumentasi

Pengumpulan data melalui studi dokumen adalah metode di mana peneliti memanfaatkan arsip atau dokumen yang ada. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan bukti yang berupa dokumen arsip, serta foto dan video yang relevan dengan topik penelitian ini. Studi dokumen juga membantu peneliti untuk mengidentifikasi pola, tren, dan informasi historis yang mungkin tidak dapat diperoleh melalui metode pengumpulan data lainnya. Dengan demikian, teknik ini menjadi bagian penting dalam proses penelitian yang komprehensif dan sistematis.

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan semua informan yang telah disebutkan sebelumnya, guna mendapatkan perspektif yang komprehensif dan mendalam tentang topik penelitian. Melalui wawancara ini, penulis berharap dapat menggali informasi yang beragam dan memahami berbagai sudut pandang yang dapat memperkaya analisis.

2. Analisis data

Setelah melakukan wawancara, data yang telah dikumpulkan akan diolah sesuai dengan metodologi penelitian yang telah ditetapkan. Hasil dari pengolahan data ini akan digunakan untuk menyusun laporan penelitian yang komprehensif, yang tidak hanya mencerminkan suara

para informan tetapi juga memberikan wawasan baru mengenai topik yang diteliti.

3. Laporan Hasil Analisis

Penulis menyusun laporan yang komprehensif terkait dengan analisis yang telah dilakukan. Laporan ini mencakup ringkasan metodologi penelitian, hasil analisis data, serta interpretasi temuan yang dihasilkan dari wawancara dengan para informan. Dalam laporan tersebut, penulis juga menyajikan kutipan langsung dari narasumber untuk memberikan konteks dan mendukung argumen yang diajukan.

Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menggambarkan argumen dari hasil wawancara. Selanjutnya, kesimpulan ditarik secara induktif, yaitu dengan menggeneralisasi dari realitas khusus yang didukung oleh hasil studi kepustakaan.

3.8. Teknik Keabsahan Data

Data hasil penelitian dapat dikatakan valid apabila data tersebut sesuai dengan kondisi nyata yang sebenarnya terjadi di lapangan. Proses ini bertujuan agar data yang dikumpulkan tidak mengandung bias, kesalahan interpretasi, atau kesalahan persepsi dari peneliti. Keabsahan data menjadi landasan kuat dalam menghasilkan kesimpulan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji keabsahan data melalui penguatan yang diperoleh dari berbagai sumber informasi. Teknik ini bertujuan untuk membandingkan dan mengecek konsistensi informasi yang diperoleh dari informan yang berbeda. Setelah peneliti menganalisis data, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan sementara, kemudian meminta konfirmasi atau persetujuan dari ketiga sumber data yang telah diwawancarai atau diamati. Jika ketiga sumber data tersebut memberikan informasi yang relatif sama, maka data yang

diperoleh dapat dikatakan valid. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan signifikan, peneliti perlu melakukan pendalaman lebih lanjut untuk memperoleh kejelasan.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data terhadap sumber yang sama. Tujuan dari triangulasi ini adalah untuk melihat kesesuaian data yang diperoleh melalui metode yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh melalui wawancara akan diverifikasi menggunakan hasil observasi, studi dokumentasi, serta teknik pengumpulan data lainnya. Jika data dari berbagai teknik tersebut menunjukkan hasil yang konsisten, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut valid dan dapat digunakan sebagai dasar dalam analisis penelitian.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu bertujuan untuk menguji keabsahan data dengan cara melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda. Waktu pengambilan data dapat mempengaruhi keakuratan informasi yang diperoleh dari informan. Sebagai contoh, pengumpulan data yang dilakukan pada pagi hari cenderung menghasilkan data yang lebih akurat karena informan masih dalam kondisi segar, sehingga mampu memberikan jawaban yang jelas dan tidak terganggu oleh kelelahan. Sebaliknya, pengumpulan data pada waktu sore atau malam hari mungkin dipengaruhi oleh kelelahan informan, yang dapat memengaruhi kualitas data yang diberikan. Oleh karena itu, pengujian keabsahan melalui triangulasi waktu dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari sesi interview, observasi, atau teknik lainnya pada waktu yang berbeda-beda untuk memastikan konsistensi data.

Dengan menerapkan ketiga jenis triangulasi ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar valid, dapat dipercaya, dan mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Uji keabsahan yang baik akan memperkuat keandalan hasil penelitian sehingga kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1. Partai Politik

4.1.1. Sejarah Partai Politik

Sejarah partai politik di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda, yang menandai awal pembentukan partai-partai politik di wilayah yang kala itu dikenal sebagai Hindia Belanda. Salah satu partai politik pertama yang didirikan adalah *De Indische Partij*, yang berdiri pada tanggal 25 Desember 1912. Partai ini didirikan oleh sejumlah tokoh penting, seperti Ernest Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Ki Hajar Dewantara. Pembentukan partai ini menjadi tonggak penting dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan, meskipun saat itu masih dalam bentuk organisasi yang bertujuan memperjuangkan hak-hak masyarakat pribumi di bawah penjajahan Belanda.

Kehadiran berbagai partai politik dan organisasi di Indonesia pada masa penjajahan Belanda mencerminkan tumbuhnya kesadaran nasional di kalangan rakyat yang semakin sadar akan pentingnya perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Selain *De Indische Partij*, berbagai organisasi lainnya seperti Boedi Oetomo, Sarekat Islam, dan Partai Nasional Indonesia (PNI) memainkan peran yang sangat signifikan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, partai-partai yang memiliki landasan agama maupun sekuler juga turut aktif terlibat dalam gerakan pergerakan nasional. Kesemuanya memiliki tujuan yang sama, yakni untuk membebaskan Indonesia dari cengkeraman penjajahan dan mengusung cita-cita kemerdekaan bangsa (Kompas.com, 2023).

Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945, berbagai partai politik mulai berperan penting dalam membangun pemerintahan serta memperjuangkan kemerdekaan secara *de facto*. Pembentukan partai politik

ini merupakan kelanjutan dari kesadaran nasional yang telah tumbuh sejak masa penjajahan, di mana organisasi-organisasi politik *seperti Indische Partij* dan Sarekat Islam telah menggerakkan semangat kebangsaan. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mendorong pembentukan partai-partai politik sebagai wadah resmi untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan memperkuat sistem demokrasi. Pada tanggal 3 November 1945, Maklumat Nomor X yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta memberikan anjuran resmi untuk pembentukan partai politik. Berbagai partai dengan latar belakang ideologi nasionalis, sosialis, agamis, dan komunis kemudian bermunculan, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Nahdatul Ulama (NU).

Pada masa demokrasi parlementer di Indonesia, partai-partai politik bersaing secara ketat untuk menduduki posisi strategis baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Sistem parlementer yang diterapkan memungkinkan parlemen memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan politik, sehingga posisi di legislatif menjadi sangat penting bagi partai-partai untuk memengaruhi arah kebijakan negara. Persaingan antarpolisi berlangsung dinamis dan kompleks, dengan berbagai koalisi dan aliansi yang terbentuk untuk memenangkan pemilihan umum dan membentuk pemerintahan. Partai-partai nasionalis, Islam, dan komunis saling berlomba mendapatkan dukungan rakyat melalui program-program politik yang mereka tawarkan. Selain itu, masa demokrasi parlementer juga ditandai dengan kebebasan berpendapat dan aktivitas politik yang relatif terbuka, sehingga partai-partai dapat mengorganisasi kader dan massa secara lebih leluasa. Namun, persaingan yang ketat ini kadang-kadang menimbulkan ketidakstabilan politik, karena sering terjadi pergantian kabinet dan konflik antarpolisi yang memengaruhi kelangsungan pemerintahan (Kompas.com, 2023).

Setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI), Partai Komunis Indonesia (PKI) dibubarkan secara resmi oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya menertibkan situasi politik yang kacau dan menghilangkan

pengaruh komunisme di Indonesia. Peristiwa tersebut menandai awal restrukturisasi besar-besaran dalam sistem politik nasional, di mana Presiden Soeharto mengambil langkah tegas untuk membatasi jumlah partai politik yang diizinkan beroperasi. Pada masa Orde Baru, hanya tiga partai yang dilegalkan, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Golkar sendiri sebenarnya bukanlah partai politik dalam arti konvensional, melainkan sebuah kelompok fungsional yang didukung penuh oleh pemerintah dan birokrasi sebagai alat politik utama rezim Soeharto (Gramedia.com, 2024).

Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, sistem politik Indonesia dikontrol dengan sangat ketat oleh pemerintah. Kebebasan berpolitik yang sebelumnya sempat berkembang pada masa demokrasi parlementer dan awal kemerdekaan, kini dibatasi secara signifikan untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan rezim. Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan yang membatasi aktivitas partai politik, pembentukan organisasi masyarakat, serta kebebasan berpendapat di ruang publik. Media massa juga diawasi secara ketat agar tidak menyebarkan informasi yang dianggap mengancam kekuasaan atau memicu ketidakstabilan politik. Akibatnya, ruang demokrasi menjadi sangat sempit, dan partisipasi politik masyarakat terbatas hanya pada mekanisme yang telah diatur oleh pemerintah. Sistem ini menciptakan suasana politik yang terkendali namun otoriter, di mana kritik terhadap pemerintah sulit disampaikan dan oposisi politik hampir tidak memiliki ruang untuk berkembang (Gramedia.com, 2024).

Jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998 menandai berakhirnya era otoritarianisme dan membuka babak baru dalam sejarah politik Indonesia, yaitu era demokrasi multipartai yang lebih terbuka dan dinamis. Kebebasan berpolitik yang sebelumnya dibatasi mulai diberikan kembali kepada masyarakat, sehingga ratusan partai politik baru bermunculan di seluruh Indonesia, termasuk di berbagai daerah seperti Lampung. Munculnya partai-partai ini mencerminkan semangat reformasi dan keinginan masyarakat

untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Namun, tidak semua partai tersebut mampu bertahan atau memenuhi persyaratan administratif dan verifikasi yang ketat dalam pemilihan umum. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa partai-partai yang ikut serta dalam pemilu memiliki struktur organisasi yang jelas, basis dukungan yang memadai, serta program politik yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Meskipun demikian, keberadaan banyak partai politik baru ini memperkaya pilihan politik bagi rakyat dan menandai kebangkitan demokrasi yang lebih inklusif dan pluralistik di Indonesia setelah puluhan tahun mengalami pembatasan ketat pada masa Orde Baru (Gramedia.com, 2024).

Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998, setelah jatuhnya rezim Presiden Soeharto, menjadi tonggak perubahan besar dalam lanskap politik Indonesia, terutama dalam dinamika kehidupan partai-partai politik. Peristiwa ini membawa transformasi signifikan dalam sistem politik negara, di mana perubahan-perubahan mendasar terjadi pada struktur dan mekanisme partai politik, termasuk dalam hal kebebasan berorganisasi, sistem pemilihan, serta penguatan demokrasi. Reformasi ini membuka ruang bagi berbagai partai politik untuk berkembang, dengan lebih banyak kebebasan dalam berkompetisi dan menyuarakan kepentingan rakyat tanpa adanya tekanan dari kekuasaan yang otoriter seperti yang terjadi pada masa Orde Baru (Idsejarah.net, 2016).

Pada masa Orde Baru, Indonesia menganut sistem partai terbatas, di mana hanya tiga partai politik yang diizinkan untuk beroperasi secara sah, sehingga ruang bagi perkembangan dan persaingan politik sangat terbatas. Namun, dengan dimulainya Era Reformasi pada tahun 1998, situasi tersebut berubah secara drastis. Reformasi membuka pintu demokrasi yang lebih luas, memberi kebebasan bagi partai-partai politik untuk berkembang tanpa adanya pembatasan yang ketat. Hal ini menyebabkan kebangkitan partai-partai politik baru dan lahirnya sistem multipartai yang lebih dinamis dan inklusif, di mana berbagai kelompok masyarakat bisa lebih leluasa

menyuarakan aspirasi mereka melalui berbagai partai yang mewakili beragam ideologi dan kepentingan. Dengan sistem multipartai ini, Indonesia memasuki era baru di mana persaingan politik menjadi lebih kompetitif dan beragam, sekaligus memperkuat prinsip-prinsip demokrasi yang lebih transparan dan partisipatif (Wikipedia, 2025).

Pada era reformasi pasca jatuhnya rezim Orde Baru, sistem politik Indonesia ditandai dengan pelaksanaan pemilu secara langsung dan kebebasan berpolitik yang jauh lebih terbuka dibandingkan masa sebelumnya. Pemilu langsung menjadi ciri utama demokrasi baru ini, di mana rakyat secara langsung memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif maupun eksekutif tanpa perantara, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan keterwakilan politik. Kebebasan berpolitik juga dijamin dengan adanya ruang yang luas bagi partai-partai politik untuk berkembang dan bersaing secara sehat dalam menentukan arah pemerintahan dan kebijakan nasional. Partai politik berperan sangat penting sebagai wahana aspirasi masyarakat sekaligus sebagai penyeimbang kekuasaan pemerintah, dengan adanya partai koalisi dan oposisi yang aktif menjaga stabilitas demokrasi. Selain itu, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat semakin terjamin, sehingga masyarakat dapat mengkritik dan mengawasi jalannya pemerintahan secara lebih berhasil (Indonesia Investment, 2025).

4.1.2. Sejarah Partai Politik Lampung

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pembentukan partai politik mulai tumbuh pesat di berbagai daerah, termasuk di Lampung. Di masa awal kemerdekaan, dinamika politik di Lampung sangat dipengaruhi oleh perkembangan di tingkat nasional, di mana tiga ideologi utama—nasionalisme, Islam, dan komunisme—mewarnai konstelasi partai politik. Partai-partai besar seperti PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi kekuatan utama yang berperan aktif dalam kehidupan politik lokal. Partai-partai besar seperti PNI, Masyumi, NU, dan PKI memainkan peran yang sangat penting dalam menggalang dukungan serta menyuarakan aspirasi rakyat Lampung baik di tingkat

nasional maupun daerah. Keberadaan partai-partai ini tidak hanya sebagai wadah politik, tetapi juga sebagai saluran utama bagi masyarakat Lampung untuk menyampaikan kebutuhan, harapan, dan tuntutan mereka kepada pemerintah pusat dan daerah. PNI yang mengusung semangat nasionalisme menjadi kekuatan utama dalam memperjuangkan kemerdekaan dan pembangunan nasional, sementara Masyumi dan NU mewakili suara umat Islam yang memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat Lampung. Di sisi lain, PKI hadir sebagai representasi kaum buruh dan petani yang menuntut perubahan sosial dan keadilan ekonomi (Idsejarah.net, 2018).

Hasil Pemilu 1955 di Lampung bahkan mencerminkan konfigurasi kekuatan politik yang serupa dengan yang terjadi di tingkat nasional, di mana Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Masyumi mendominasi perolehan suara serta kursi legislatif. Dominasi keempat partai besar ini menunjukkan bahwa masyarakat Lampung memiliki preferensi politik yang sejalan dengan tren nasional, baik dari segi ideologi maupun orientasi kebijakan. Namun, seiring berjalannya waktu, dinamika politik di Lampung mengalami perubahan signifikan akibat berbagai faktor internal dan eksternal. Salah satu peristiwa penting adalah pembekuan Masyumi oleh pemerintah Orde Lama, yang menyebabkan terjadinya pergeseran kekuatan di antara partai-partai Islam. Peran politik umat Islam yang sebelumnya banyak diwakili oleh Masyumi, kemudian beralih ke NU yang semakin menguatkan posisinya di Lampung (Kompasiana.com, 2021).

Setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI), dinamika politik nasional dan daerah mengalami perubahan yang sangat drastis. Peristiwa ini, yang melibatkan upaya kudeta dan pembunuhan enam perwira tinggi militer, memicu krisis politik dan keamanan yang mendalam di Indonesia. Sebagai konsekuensi langsung, Partai Komunis Indonesia (PKI) dibubarkan secara resmi oleh pemerintah Orde Baru, dan ideologi komunis dilarang keras di seluruh negeri. Represi besar-besaran dilakukan terhadap anggota dan simpatisan PKI, yang menyebabkan ribuan orang dipenjara,

diasingkan, bahkan dieksekusi tanpa proses peradilan yang adil. Selain itu, peran militer dalam politik semakin menguat secara signifikan, mengambil alih posisi strategis dalam pengambilan keputusan negara (Kompasiana.com, 2021).

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, sistem politik Indonesia mengalami sentralisasi yang ketat dengan pembatasan aktivitas partai politik. Pemerintah hanya melegalkan tiga partai politik, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Golkar, yang merupakan kendaraan politik utama rezim Orde Baru, didukung penuh oleh pemerintah dan birokrasi daerah, termasuk di Lampung. Partai ini memiliki jaringan luas hingga ke tingkat desa dan didanai untuk mempromosikan kebijakan pemerintah pusat. Pegawai negeri sipil dan kepala desa diwajibkan memberikan dukungan kepada Golkar, sehingga partai ini menjadi kekuatan dominan dalam politik lokal Lampung. Sementara PDI dan PPP, meskipun dilegalkan, aktivitas politiknya sangat dibatasi dan hanya berfungsi sebagai partai pelengkap dalam sistem politik yang dikendalikan secara ketat oleh pemerintah (Merdeka.com, 2020).

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, sistem politik Indonesia kembali mengadopsi sistem multipartai yang memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk membentuk dan bergabung dengan berbagai partai politik. Di Lampung, fenomena ini ditandai dengan munculnya banyak partai politik baru, baik yang berskala nasional maupun partai lokal yang berusaha mewakili aspirasi masyarakat setempat. Partai-partai besar seperti PDI Perjuangan, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) aktif bersaing dalam pemilihan umum di tingkat daerah maupun nasional. Persaingan ini mencerminkan dinamika demokrasi yang lebih terbuka dan pluralistik dibandingkan masa Orde Baru, di mana hanya tiga partai yang dilegalkan. Kebebasan berpolitik yang tumbuh pasca reformasi ini mendorong partisipasi politik yang lebih luas dan beragam, sekaligus

menimbulkan tantangan dalam mengelola fragmentasi politik yang cukup tinggi di Lampung dan Indonesia secara umum (Merdeka.com, 2020).

4.1.3. Fungsi Partai Politik

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dan berfungsi sebagai pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Partai politik menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, ide, dan kepentingan politiknya secara terorganisir dan terstruktur. Melalui partai politik, proses seleksi dan pencalonan pemimpin dilakukan secara demokratis, sehingga menghasilkan pemimpin yang mewakili suara rakyat. Berikut beberapa contoh Fungsi dari partai politik:

1. Menyalurkan Aspirasi Masyarakat
2. Menyusun dan Menawarkan Program Pemerintahan
3. Mencalonkan dan Memilih Pemimpin
4. Mendidik dan Melatih Kader Politik
5. Menjaga Stabilitas Politik dan Sistem Demokrasi
6. Mengawasi Pemerintahan

Oleh karena itu, keberadaan partai politik sangat krusial dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan kemajuan bangsa Indonesia. (mkri.id, 2025)

4.2. Partai Gerindra

4.2.1. Sejarah Partai Gerindra

Sejarah Partai Gerindra, Partai Gerindra didirikan pada tanggal 6 Februari 2008 dengan peran sentral dari Prabowo Subianto, seorang mantan Letnan Jenderal TNI sekaligus menantu Presiden Soeharto. Prabowo menjadi ketua dewan pembina partai dan memberikan ide-ide yang membentuk visi, misi, serta manifesto perjuangan Gerindra. Partai ini lahir dari keprihatinan sejumlah tokoh, termasuk adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, dan Fadli Zon, terhadap kondisi politik Indonesia yang dianggap jauh dari nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial. Gerindra mengusung karakter

nasionalis dan berpihak pada rakyat, dengan lambang kepala burung Garuda yang diusulkan Prabowo sebagai simbol partai. Sejak berdirinya, Gerindra berkembang pesat dan menjadi salah satu kekuatan politik utama di Indonesia, aktif bersaing dalam pemilu legislatif dan ikut menentukan arah politik nasional (Website Partai Gerindra, 2025).

Pada awal pendiriannya, partai ini memiliki tujuan utama untuk menjadi wadah bagi tokoh-tokoh nasionalis dan kalangan militer yang memiliki visi kuat dalam pembangunan nasional. Para pendiri Gerindra meyakini bahwa peran nasionalisme yang kokoh dan pengalaman militer yang disiplin sangat penting untuk mendorong kemajuan bangsa Indonesia. Mereka ingin menggabungkan semangat patriotisme dengan pendekatan yang pragmatis dalam mengelola negara, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang kompleks. Dengan latar belakang para tokoh militer yang memahami pentingnya stabilitas dan keamanan, serta para nasionalis yang menekankan nilai-nilai persatuan dan kemandirian, Gerindra berambisi membangun Indonesia yang kuat secara politik, ekonomi, dan sosial. Pendekatan ini diharapkan dapat menginspirasi kebijakan-kebijakan strategis yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, sejak awal, partai ini menempatkan diri sebagai kekuatan politik yang mengedepankan integritas, disiplin, dan semangat nasionalisme yang tinggi dalam setiap langkah perjuangannya.

Partai Gerindra mengusung tema utama "Keadilan Sosial untuk Seluruh Rakyat Indonesia" sebagai landasan perjuangannya dalam membangun bangsa. Fokus utama partai ini meliputi kemandirian ekonomi, keadilan sosial, pertahanan negara, serta pemberantasan korupsi yang menjadi masalah kronis di Indonesia. Dalam bidang ekonomi, Gerindra menekankan pentingnya ekonomi kerakyatan yang mampu memberdayakan petani, nelayan, dan kelompok masyarakat marginal agar keluar dari lingkaran kemiskinan struktural melalui akses permodalan yang mudah dan modernisasi teknologi pertanian serta perikanan.

Partai ini juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok pekerja seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) honorer, guru bantu, dan buruh pabrik dengan memperjuangkan kejelasan status dan peningkatan pendapatan yang layak. Selain itu, Gerindra berupaya memastikan perlindungan sosial yang sistemik bagi masyarakat rentan, termasuk fakir miskin, penyandang cacat, anak terlantar, dan lansia, agar mereka dapat diberdayakan secara sosial dan ekonomi. Dalam aspek pertahanan negara, Gerindra menempatkan kedaulatan dan keamanan nasional sebagai prioritas utama untuk menjaga keutuhan dan kemandirian bangsa. Pemberantasan korupsi juga menjadi fokus penting, dengan pendekatan tegas tanpa pandang bulu terhadap pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme demi menciptakan pemerintahan yang bersih, berhasil, dan berwibawa. Melalui visi dan program tersebut, Gerindra berusaha mewujudkan tatanan sosial dan ekonomi yang adil serta pemerintahan yang transparan, sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati kesejahteraan dan keadilan secara merata (Gerindra, 2025).

Partai Gerindra dikenal luas sebagai partai politik yang mengusung nilai-nilai nasionalisme yang kuat dan konsisten menyuarakan isu-isu kedaulatan negara dalam setiap kesempatan. Nasionalisme yang diusung Gerindra bukan hanya sekadar retorika, tetapi menjadi landasan utama dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program partai. Gerindra menempatkan kedaulatan negara sebagai prioritas utama, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi, intervensi asing, dan berbagai ancaman terhadap keutuhan wilayah Indonesia. Partai ini aktif memperjuangkan penguatan pertahanan dan keamanan nasional, menjaga sumber daya alam dari eksploitasi yang merugikan bangsa, serta menegakkan kedaulatan ekonomi dengan mendorong kemandirian dan proteksi terhadap produk dalam negeri. Selain itu, Gerindra juga sering mengangkat isu-isu terkait kedaulatan budaya dan identitas bangsa, mengajak masyarakat untuk bangga dan menjaga warisan budaya Indonesia (Gerindra.id, 2025).

4.2.2. Partai Gerindra di Lampung

Di Provinsi Lampung, Partai Gerindra memulai langkah strategis dengan membangun struktur organisasi yang kuat dan mengembangkan jaringan kader secara intensif. Tujuan utama dari upaya ini adalah menghadirkan alternatif politik yang berbeda dengan menekankan nilai-nilai nasionalisme, kemandirian ekonomi, dan keadilan sosial sebagai fondasi perjuangan partai. Para kader awal Gerindra di Lampung tidak hanya fokus pada pembentukan struktur formal, tetapi juga aktif melakukan konsolidasi internal untuk memperkuat soliditas partai serta melakukan sosialisasi visi dan misi partai kepada masyarakat luas. Melalui berbagai kegiatan seperti pertemuan rutin, seminar, dan kampanye politik, Gerindra berhasil menarik perhatian dan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan pemuda, petani, hingga pelaku usaha kecil dan menengah. Keberhasilan dalam membangun jaringan yang luas ini membuat Gerindra mampu menempatkan diri sebagai kekuatan politik yang solid dan berpengaruh di Lampung (Partai Gerindra Lampung, 2025).

Seiring berjalannya waktu, jumlah kader Partai Gerindra di Lampung mengalami peningkatan yang sangat signifikan, bahkan mencapai puluhan ribu orang. Pertumbuhan jumlah kader ini mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan dan antusiasme masyarakat terhadap visi dan misi perjuangan yang diusung oleh Gerindra. Basis massa yang kuat ini menjadi modal utama bagi partai untuk memperluas pengaruhnya di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan pemuda, petani, hingga pelaku usaha kecil dan menengah. Selain itu, struktur organisasi Gerindra yang terbangun dengan baik dan terorganisir secara sistematis memperkuat kemampuan partai dalam menjalankan aktivitas politik secara berhasil dan efisien. Partai ini tidak hanya aktif berpartisipasi dalam berbagai pemilihan umum, baik di tingkat daerah maupun nasional, tetapi juga berperan penting dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan publik di provinsi tersebut. Keberadaan Gerindra yang kuat di Lampung turut memberikan warna baru dalam dinamika politik lokal, sekaligus menjadi representasi aspirasi

masyarakat yang menginginkan perubahan dan kemajuan yang berkeadilan.

Pada Pemilu 2024, Partai Gerindra berhasil meraih kemenangan signifikan dalam Pemilu Legislatif di Provinsi Lampung, sekaligus memberikan dukungan penuh kepada Prabowo Subianto dalam ajang Pemilihan Presiden. Keberhasilan ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat Lampung terhadap visi dan program Gerindra serta kepemimpinan Prabowo yang dianggap mampu membawa perubahan positif bagi daerah dan bangsa. Menyikapi momentum tersebut, Gerindra mengambil langkah strategis dengan menggelar konsolidasi besar-besaran di seluruh 15 kabupaten dan kota se-Lampung. Konsolidasi ini bertujuan untuk memperkuat struktur partai, meningkatkan koordinasi antar kader, serta mempersiapkan strategi pemenangan yang matang dalam menghadapi Pemilihan Gubernur Lampung yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024. Melalui pendekatan yang sistematis dan partisipatif, Gerindra berupaya memastikan bahwa seluruh elemen partai di tingkat daerah dapat bekerja secara sinergis demi meraih kemenangan dalam PILKADA tersebut. Langkah ini sekaligus menjadi bukti komitmen Gerindra untuk terus memperkuat pengaruh politiknya di Lampung dan berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan serta kebijakan daerah ke depan (Website Gerindra Lampung, 2025).

Pada bulan Maret 2022, Rahmat Mirzani Djausal resmi ditunjuk dan dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Lampung. Pengangkatan ini berdasarkan Surat Keputusan Susunan Personalia DPD Gerindra Lampung yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani pada tanggal 23 Maret 2022. Rahmat Mirzani, yang akrab disapa Kiyai Mirza, dikenal sebagai sosok pemimpin muda yang berpengalaman, aktif sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung dan Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Lampung. (gerindra lampung)

4.3. Pemilihan Kepala Daerah

Pada masa Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia sangat berbeda dengan praktik demokrasi saat ini. Kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota umumnya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, kemudian penetapannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Dalam sistem ini, masyarakat tidak memiliki hak untuk secara langsung memilih pemimpin daerahnya, sehingga proses pemilihan kepala daerah bersifat tidak langsung dan sangat dikontrol oleh pemerintah pusat. Hal ini mencerminkan karakter sentralistik dan otoriter dari rezim Orde Baru, yang mengutamakan stabilitas politik dan pengendalian kekuasaan di tingkat nasional (Antara News, 2024).

PILKADA pada masa itu lebih merupakan mekanisme politik internal yang melibatkan elit-elit partai dan pejabat pemerintah, tanpa keterlibatan langsung rakyat sebagai pemilih. Kondisi ini membatasi partisipasi politik masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah, sekaligus memperkuat dominasi pemerintah pusat dalam mengatur jalannya pemerintahan di daerah-daerah. Sistem ini baru mengalami perubahan signifikan setelah era reformasi, ketika pemilihan kepala daerah mulai dilakukan secara langsung sebagai bentuk demokratisasi dan desentralisasi kekuasaan (AntaraNews, 2024).

Setelah jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan dan demokrasi. Salah satu perubahan paling signifikan adalah penerapan desentralisasi dan otonomi daerah yang memberi kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri. Melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan perubahannya, kekuasaan yang sebelumnya sangat terpusat di pemerintah pusat mulai dialihkan ke daerah, termasuk dalam pengelolaan anggaran, kebijakan lokal, dan pengambilan keputusan yang menyangkut

kepentingan masyarakat setempat (AntaraNews, 2024).

Pemerintah pusat kini hanya menangani urusan strategis seperti pertahanan, kebijakan luar negeri, fiskal-moneter makroekonomi, peradilan, dan agama. Dengan adanya desentralisasi ini, daerah-daerah memperoleh ruang yang lebih luas untuk berkembang sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing, sekaligus menerima bagian pendapatan yang lebih besar dari sumber daya alam lokal. Reformasi ini juga menandai era kebebasan pers dan kebebasan berpolitik yang lebih terbuka, serta pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan adil. Secara keseluruhan, langkah desentralisasi dan otonomi daerah menjadi fondasi penting dalam memperkuat demokrasi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan di Indonesia pasca Orde Baru (Kompas, 2024).

Pada tahun 2005, pemerintah Indonesia mulai menerapkan sistem Pemilihan Kepala Daerah PILKADA secara langsung, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung tanpa perantara. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan pemimpin daerahnya sendiri. Pelaksanaan PILKADA langsung bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan daerah dengan memperkuat hubungan antara kepala daerah dan rakyat yang memilihnya. Sebelumnya, kepala daerah dipilih secara tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sehingga kontrol dan pengaruh pemerintah pusat sangat dominan dalam proses tersebut (Kompas, 2024).

Dengan PILKADA langsung, masyarakat dapat secara langsung menilai dan memilih calon pemimpin yang dianggap paling mampu mewakili aspirasi dan kebutuhan daerahnya. Selain itu, PILKADA langsung juga membuka ruang bagi debat publik dan kampanye yang lebih terbuka, sehingga calon kepala daerah harus mampu menyampaikan visi, misi, dan program kerja secara jelas kepada pemilih. Sejak pelaksanaan pertamanya di tahun 2005, PILKADA langsung terus berkembang dan menjadi

mekanisme demokrasi yang penting dalam memperkuat otonomi daerah serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat di tingkat lokal (TribrataNews, 2025).

PILKADA langsung membawa perubahan signifikan dalam dinamika politik di Indonesia dengan menciptakan suasana yang lebih terbuka dan kompetitif. Melalui sistem ini, masyarakat diberi kesempatan langsung untuk memilih pemimpin daerah yang dianggap mampu mewakili aspirasi dan kepentingan mereka, sehingga proses demokrasi menjadi lebih hidup dan partisipatif. Kompetisi antar calon kepala daerah pun semakin ketat, mendorong mereka untuk menyusun program kerja yang jelas dan melakukan kampanye yang lebih intensif demi meraih dukungan publik. Namun, di balik berbagai kemajuan tersebut, PILKADA langsung juga menghadapi sejumlah tantangan serius yang perlu diatasi (TribrataNews, 2025).

PILKADA sering kali memicu konflik sosial di tingkat lokal, terutama ketika persaingan politik memanas dan memecah belah masyarakat berdasarkan kepentingan kelompok. Politisasi identitas seperti suku, agama, dan ras juga menjadi tantangan besar yang dapat mengancam persatuan dan kerukunan antarwarga. Selain itu, Salah satu masalah utama adalah praktik politik uang yang masih marak terjadi, di mana calon atau tim sukses menggunakan uang untuk mempengaruhi pemilih demi meraih kemenangan. Salah satu masalah utama adalah praktik politik uang yang masih marak terjadi, di mana calon atau tim sukses menggunakan uang untuk mempengaruhi pemilih demi meraih kemenangan (TribrataNews, 2024).

Pemerintah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berupaya memperbaiki sistem Pemilihan Kepala Daerah PILKADA agar berjalan lebih adil, transparan, dan demokratis. Upaya ini diwujudkan melalui rencana revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang PILKADA yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. Revisi ini bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang kerap

muncul dalam pelaksanaan PILKADA, seperti politik uang, konflik sosial, dan politisasi identitas, sekaligus meningkatkan integritas dan efisiensi proses pemilihan. Oleh karena itu, meskipun PILKADA langsung telah membawa kemajuan dalam demokrasi daerah, upaya terus-menerus diperlukan dari pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat untuk mengatasi berbagai kendala tersebut agar proses pemilihan kepala daerah dapat berjalan secara jujur, adil, dan damai (TribrataNews, 2024).

4.3.1. Fungsi PILKADA

PILKADA memiliki fungsi yang sangat sakral bagi negara Indonesia karena merupakan wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin daerah secara langsung dan demokratis. Beberapa fungsinya adalah:

1. Memilih Pemimpin Daerah secara Demokratis
2. Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi
3. Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Daerah
4. Memperkuat Demokrasi di Tingkat Daerah

Dengan demikian, PILKADA bukan hanya proses politik semata, tetapi juga fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, bersih, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia. (Merdeka.com, 2024)

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka didapatkan beberapa kesimpulan terkait hasil Strategi Komunikasi Partai Politik Dalam Pemenangan Gubernur Lampung Di PILKADA Serentak 2024 (Studi Pada Partai Gerindra) sebagai berikut :

1. Strategi Organisasi

Partai Gerindra berhasil mengorganisasi internal partai secara solid melalui konsolidasi struktur partai dari tingkat DPD hingga akar rumput. Penguatan mesin partai dan koordinasi antar kader dilakukan secara intensif, sehingga seluruh elemen partai bekerja serempak memenangkan pasangan Mirza-Jihan.

2. Strategi Program

Pasangan calon menyampaikan program yang konkret dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan program kesejahteraan. Program-program ini dikemas secara komunikatif dan realistis, memudahkan masyarakat dalam memahami manfaat yang ditawarkan.

3. Strategi Pendukung Sumber Daya

Dalam pelaksanaan kampanye, Gerindra melibatkan *influencer*, tokoh masyarakat, dan relawan lokal yang memiliki pengaruh di komunitas masing-masing. Media sosial dimaksimalkan sebagai sarana komunikasi utama yang menjangkau generasi muda. Kampanye dilakukan secara masif dan personal, sehingga pesan politik lebih tepat sasaran.

4. Strategi Kelembagaan

Koalisi besar yang dibangun oleh Gerindra bersama partai-partai lain seperti Golkar, Demokrat, PAN, dan lainnya (Koalisi Indonesia Maju Plus) menunjukkan kekuatan politik dan logistik yang luas. Dukungan multi-partai memperkuat legitimasi pasangan calon serta memperluas jaringan dukungan hingga ke wilayah terpencil.

Kombinasi keempat strategi tersebut menghasilkan efek elektoral yang sangat signifikan. Elektabilitas pasangan calon meningkat tajam hanya dalam beberapa bulan, hingga akhirnya meraih kemenangan mutlak dengan perolehan suara sebesar 82,54% melawan 17,46% suara pesaingnya. Ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang terencana dan berbasis kondisi sosial-politik lokal terbukti sangat berhasil.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti kemukakan, maka peneliti mengajukan dan memberikan beberapa saran yang dianggap perlu untuk dapat dipertimbangkan sebagai bahan masukan oleh Partai Gerindra Provinsi Lampung dalam melakukan Strategi Komunikasi Partai Politik Dalam Pemenangan Gubernur Lampung Di PILKADA Serentak 2024. Selanjutnya, sebagai berikut :

1. Untuk Partai Politik:
Strategi komunikasi Partai Gerindra bisa menjadi contoh bagi partai lain, namun perlu disesuaikan dengan budaya lokal dan dijalankan secara etis dan transparan.
2. Untuk Pasangan Calon Terpilih:
Kepercayaan besar dari masyarakat harus dijaga dengan merealisasikan program-program yang dijanjikan saat kampanye. Komunikasi dua arah dengan masyarakat perlu terus dilanjutkan sebagai bagian dari akuntabilitas dan pelibatan publik dalam proses pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, R., & Valentina, T. R. (2021). Modal Politik dan Modal Sosial Athari Gauthi Ardi Pada Kemenangan Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 169–185. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i1.2496>
- Antara News. (2024). *Pengertian dan sejarah singkat Pilkada di Indonesia*. Diakses 3 Juli 2025. <https://www.antaraneews.com/berita/4184601/pengertian-singkat-pilkada-di-indonesia>
- Ardha, B. (2014). Social Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik 2014 Di Indonesia. *Jurnal Visi Komunikasi*, 13(01), 105–120. <http://oreilly.com/web2/archive/>
- Arif Prasetyo, W., Eka Wisnu, W., & Nurgiansah, T. H. (2022). Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3217–3225.
- Aryadillah, A., & Fitriansyah, F. (2022). Strategi Kampanye Politik Anies Baswedan dalam Membangun Citra Politik Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024. *Jurnal Public Relations (J-PR)*, 3(1), 87–92. <https://doi.org/10.31294/jpr.v3i1.1150>
- Aliyah, Aryani, L., & Priyanti, E. (2022). Strategi Pemerintah Desa Muara dalam Pengembangan Agrowisata (Studi Kasus Agrowisata Melon Emas di Desa Muara Kabupaten Karawang). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* <https://Jurnal.Peneliti.Net/Index.Php/JIWP>, 4(1), 3–4. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6357836>
- Baharuddin, T., & Purwaningsih, T. (2017). Modalitas Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(1), 205–237. <https://doi.org/10.18196/jgpp.4176>
- Bangun, E. B., Rahmatika, A., Kurniawan, B., & Madura, U. T. (2024). *Modalitas Dalam Pidato Joko Widodo Pada Upacara Peringatan Hari Pancasila 2024 : Linguistik Modalitas Dalam Pidato Joko Widodo Pada Upacara Peringatan Hari Pancasila 2024: Linguistik*. 2(7).
- Chinda Aqhni Adisi, & Abdul Sadad. (2022). Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 150–164. <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i2.581>

- DPD Gerindra Provinsi Lampung. (2025). *Sejarah Partai Gerindra*. Diakses 3 Juli 2025. <https://gerindralampung.or.id/sejarah-partai-gerindra/>
- Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 5–16. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.154>
- Fraksi Gerindra DPR-RI. (2025). *Tentang Fraksi Gerindra*. Diakses 3 Juli 2025. <https://www.fraksigerindra.id/tentang-fraksi-gerindra/>
- Gerindra.id. (2025). *Sejarah Partai Gerindra*. Diakses 3 Juli 2025. <https://gerindra.id/sejarah-partai-gerindra/>
- Gramedia. (2024). *Cara Mendirikan Partai Politik serta Pengertian, Sejarah, dan Fungsinya*. Diakses 3 Juli 2025. <https://www.gramedia.com/literasi/cara-mendirikan-partai-politik/>
- Hamdi, M. R., Adnan, I., Syarifuddin, S., & Hamroni, H. (2022). Dinamika Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 2(2), 51–65. <https://doi.org/10.59259/ab.v2i2.99>
- Harahap, H. (2019). 255788-Evaluasi-Pelaksanaan-Pilkada-Serentak-Ta-49Aa51F2. 1(01), 17–23. Jamaludin, T. (2019). Pilkada Langsung: Kisah Sukses dan Problematika. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 1(1), 29. <https://doi.org/10.21580/jpw.v1i1.3351>
- Idsejarah. *Sejarah Partai Politik*. Diakses 2 Juli 2025. https://idsejarah.net/2018/12/sejarah-partai-politik-pada-masa_3.html?utm
- Indonesia Investments. (2025). *Reformasi - Analisis Politik Indonesia Pasca Suharto - Demokrasi*. Diakses 1 Juli 2025. <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/reformasi/item181>
- Indrajati, S. F., & Ruliana, P. (2020). Strategi Program Acara the Newsroom Dalam Meningkatkan Rating Program. *Medium*, 8(1), 66–77. [https://doi.org/10.25299/medium.2020.vol8\(1\).4841](https://doi.org/10.25299/medium.2020.vol8(1).4841)
- Island, F., Islands, G., Fuke, Y., Iwasaki, T., Sasazuka, M., & Yamamoto, Y. (2021). Yusuke Fukuya 1 • Tomo Iwasaki 2 • Ryo Sasazuka 3 • Yuji Yamamoto 4. *71*(1), 63–71.
- Kompas.id. (2024). *Sejarah Pelaksanaan Pilkada Serentak di Indonesia*. Diakses 3 Juli 2025. <https://www.kompas.id/artikel/sejarah-pelaksanaan-pilkada-serentak-di-indonesia>
- Kompasiana. (2021). *Dinamika Perpolitikan Partai Masyumi dalam perkembangan Demokrasi di Indonesia*. Diakses 2 Juli 2025. <https://www.kompasiana.com/teddy8098/60e3c2cb152510145f4573f2/dinamika-perpolitikan-partai-masyumi-dalam-perkembangan-demokrasi-di->

indonesia?page=2&page_images=2&utm

Lestari, D. (2019). Pilkada DKI Jakarta 2017 : Dinamika Politik Identitas di Indonesia. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 4(4), 12. <https://doi.org/10.58258/jupe.v4i4.677>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Partai Politik Berperan Penting sebagai Pilar Demokrasi Perwakilan di Indonesia*. Diakses 2 Juli 2025. <https://www.mkri.id/index.php?id=23216&page=web.Berita&utm>

Mahmudi, M. H., & Suroso, S. (2014). Efikasi Diri, Dukungan Sosial dan Penyesuaian Diri Dalam Belajar. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 3(02), 183–194. <https://doi.org/10.30996/persona.v3i02.382>

Maharani, M. (2019). Strategi Pemenangan Pasangan Calon Herman Deru Dan Mawardi Yahya Pada Pilkada Sumatera Selatan Tahun 2018. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(1), 17–27. <https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4065>

Manar, D. G. (2018). Pilkada Langsung Dan Rekonstruksi Demokrasi Indonesia. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 12–17. <https://doi.org/10.14710/jiip.v2i2.2118>

Merdeka.com. (2024). *Partai Politik Presiden Soeharto*. Diakses 3 Juli 2025. <https://www.merdeka.com/politik/penyebab-cuma-boleh-ada-3-partai-politik-di-era-presiden-soeharto.html?utm>

Merdeka.com. (2024). *Pilkada*. Diakses 3 Juli 2025. <https://www.merdeka.com/sumut/pilkada-singkatan-dari-pemilihan-kepala-daerah-berikut-tujuan-dan-penjasannya-163934-mvk.html>

Miori, A., Syam, A. N., & Garis, R. R. (2019). “Strategi TIM Pemenangan Calon Kepala Desa Terpilih Di Desa Parigi Kabupaten Pangadara”. *Universitas Galuh*, 95–781.

Moha, M. Z., Subhan, A., & Ratnasari, D. (2021). Strategi Komunikasi Politik Tim Pemenangan Ridho dalam Pemilihan Kepala Desa Tabilaa Periode 2021-2027. *Journal of Communication Sciences (JCoS)*, 4(1), 9–23. <https://doi.org/10.55638/jcos.v4i1.665>

Muchtar, K. (2016). Komunikasi Politik dan Pembentukan Citra Partai. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(2), 136. <https://doi.org/10.31315/jik.v14i2.2127>

Mustaqim, F. K., Kusnandar, K., & Agustono, A. (2018). Analisis Kelembagaan Dan Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM Emping Melinjo Di Kabupaten Magetan. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 14(2), 124. <https://doi.org/10.20961/sepa.v14i2.25002>

Nugraha, A., & Mulyandari, A. (2016). Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Mazahib*, 15(2), 208–237.

<https://doi.org/10.21093/mj.v15i2.630>

- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>
- Pattiasina, H. Y. (2015). Strategi Komunikasi Politik PDI Perjuangan Kabupaten Maluku Tengah pada Pemilu 2014. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 19(1), 17–28.
- Pratiwi, S. R., Dida, S., & Sjafirah, N. A. (2018). Strategi Komunikasi dalam Membangun Awareness Wisata Halal di Kota Bandung. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(1), 78. <https://doi.org/10.24198/jkk.v6i1.12985>
- Priliantini, A., Krisyanti, K., & Situmeang, I. V. (2020). Pengaruh Kampanye #PantangPlastik terhadap Sikap Ramah Lingkungan (Survei pada Pengikut Instagram @GreenpeaceID). *Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 9(1), 40. <https://doi.org/10.31504/komunika.v9i1.2387>
- Rahayu, T. Y. (2019). Strategi Program Radio. *Jurnal Strategi Program Radio*, 4(1), 139–153.
- Rosidi, R. (2017). Strategi Komunikasi politik dan Budaya Transparansi Partai Politik. *Jurnal Politik Pemerintahan, Majalah Ilmiah Program Studi Ilmu Politik*, 2(1), 78–100. <https://doi.org/10.55745/jpp.v2i1.15>
- Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 73. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>
- Studipendidikan, P., & Sekolahdasar, G. (n.d.). *Eka Rahmawati*. 1–5.
- Suhara, R. B., & Kamaludin, H. E. (2021). Strategi Pemenangan Tim Sukses Dalam Pemilihan Kepala Desa Karangwangi Kec. Karangwareng Kab. Cirebon 2019-2024. *Jurnal Signal*, 9(2), 121. <https://doi.org/10.33603/signal.v9i2.3555>
- Suyatno, S. (2016). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 212. <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6586>
- Suyitno. (2018). Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya. In *Akademia Pustaka*.
- Trianziani, S. (2020). *View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk*. 4(November), 274–282.
- Triwicaksono, Y. D. B. B., & Nugroho, A. (2021). Strategi Komunikasi Politik Pemenangan Kepala Daerah. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 5(1), 133–145. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v5i1.2037>

- Thobby Wakarmamu, S. M. S. (2021). Metode Penelitian Kualitatif Penerbit Cv.Eureka Media Aksara. *Metode Penelitian Kualitatif Penerbit Cv.Eureka Media Aksara*, 1.
- Topan Iskandar. (2021). Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 174–197.
<https://doi.org/10.47006/pendalas.v1i2.80>
- Tribatanews Pringsewu. (2024). *Sejarah Pilkada di Indonesia: Dari Pemilihan Tidak Langsung ke Pemilihan Langsung*. Diakses 3 Juli <https://tribatanews-respringsewu.lampung.polri.go.id/detail-post/sejarah-pilkada-di-indonesia-dari-pemilihan-tidak-langsung-ke-pemilihan-langsung>
- Wikipedia. (2025). *Partai Politik di Indonesia*. Diakses 1 Juli 2025.
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik_di_Indonesia
- Wikipedia contributors. (2024). *Pemilihan kepala daerah di Indonesia*. Diakses 3 Juli 2025.
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia
- Zamzami, & Sahana, W. (2021). Strategi Komunikasi Organisasi. *Journal Educational Research and Social Studies*, Volume 2 N, 25–37.